



**DAMPAK KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP  
INFLASI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Penyelesaian Studi Pada Program Studi  
Ekonomi Pembangunan (S.E) Fakultas Sosial Sains Universitas  
Pembangunan Panca Budi  
Medan*

**Disusun Oleh :**

**CINDI PRATIWI  
1915210017**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

JUDUL : DAMPAK KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP INFLASI DI INDONESIA

NAMA : CINDI PRATIWI  
N.P.M : 1915210017  
FAKULTAS : SOSIAL SAINS  
PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan  
TANGGAL KELULUSAN : 01 Maret 2024

**DIKETAHUI**

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Wahyu Indah Sari, S.E., M.Si.

**DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING**

PEMBIMBING I



Dewi Mahrani Rangkuty, SE., M.Si

PEMBIMBING II



Assoc. Prof. Dr. E Rusiadi, S.E., M.Si.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : CINDI PRATIWI  
NPM : 1915210017  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL  
TERHADAP INFLASI DI INDONESIA.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain.
2. Memberi izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 01 Maret 2024  
Penulis,



**CINDI PRATIWI**  
NPM : 1915210017

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : CINDI PRATIWI  
NPM : 1915210017  
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : DAMPAK KREDIBILITAS KEBIJAKAN FISKAL  
TERHADAP INFLASI DI INDONESIA.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 01 Maret 2024  
Yang Membuat Pernyataan



**CINDI PRATIWI**  
NPM : 1915210017

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi, nilai tukar, ekspor dan hutang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia dan mengetahui faktor pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi, nilai tukar, ekspor dan hutang luar negeri secara bersama-sama terhadap inflasi di Indonesia. Hal yang diteliti bagaimana dampak pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi, nilai tukar, ekspor dan hutang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia. Dengan menggunakan data sekunder dengan rentang waktu 10 tahun dan pengolahan data menggunakan metode *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan Regresi Linear Berganda. Penelitian ini dilatar belakangi pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Dampak negatif tersebut menjadikan inflasi sebagai salah satu penyakit ekonomi yang ada di setiap negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Indonesia sendiri pada tahun 2013 laju inflasi kembali meningkat mencapai angka 6,41 persen, yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) yang terus memicu kenaikan harga angkutan umum serta kenaikan bahan makanan. Berdasarkan hasil pengujian *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) pada tabel KMO and *Bartlett's test* menunjukkan nilai tukar dan investasi signifikan terhadap inflasi di Indonesia, sedangkan pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, ekspor, dan hutang luar negeri berpengaruh negative atau tidak signifikan terhadap inflasi di Indonesia dan berdasarkan hasil uji-f (uji hipotesis simultan) menunjukkan bahwa nilai tukar dan investasi secara serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

**Kata Kunci : Nilai Tukar, Investasi Dan Inflasi Di Indonesia**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia”** Skripsi ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Skripsi ini disusun dengan harapan dapat menjadi referensi dan informasi bagi semua pihak. Proposal ini merupakan hasil maksimal yang dapat dikerjakan oleh penulis dan menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun dari segala keterbatasan yang ada diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan berupa bimbingan dan petunjuk. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Kedua orang tua Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan dorongan, nasihat, kasih sayang, doa dan dukungan material dan spiritual.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Wahyu Indah Sari, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
5. Ibu Dewi Maharani Rangkuty, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dari awal perkuliahan hingga sekarang ini.
7. Kepada seluruh sahabat, teman dan rekan, terimakasih atas motivasi yang selalu mengalir, semangat, dan kebersamaan yang tidak terlupakan serta doa-doa yang di berikan.

Demikian penyusunan Skripsi ini diselesaikan, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan juga para pembaca. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua serta memberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin.

Medan, 01 Maret 2024  
Penulis,

**CINDI PRATIWI**  
**NPM : 1915210017**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	15
C. Batasan Masalah .....	16
D. Rumusan Masalah .....	16
E. Tujuan Penelitian.....	17
F. Manfaat Penelitian.....	17
G. Keaslian Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Landasan Teori .....	20
1. Grand Theory.....	20
2. Middle Theory .....	26
3. Applied Theory.....	27
4. Inflasi .....	31
5. Pajak .....	35
6. Pengeluaran Pemerintah .....	36
7. Suku Bunga .....	38
8. Investasi .....	40
9. Nilai Tukar.....	42
10. Ekspor.....	44
11. Hutang Luar Negeri .....	45
B. Penelitian Terdahulu.....	47



C. Kerangka Konseptual .....	50
D. Hipotesis .....	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Pendekatan Penelitian.....	52
B. Tempat Dan Waktu Pelitian .....	52
C. Definisi Operasional Variabel .....	52
D. Jenis Dan Sumber Data .....	53
E. Teknik Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>64</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	64
B. Perkembangan Inflasi Di Indonesia.....	65
C. Hasil Penelitian.....	67
1. Hasil Analisis Data <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA).....	67
2. Hasil Analisis Data Regresi Linear Berganda .....	75
D. Pembahasan .....	80
1. Analisis Hasil <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA) .....	80
2. Analisis Hasil Regresi Linear Berganda.....	105
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Inflasi Negara Indonesia 2013-2022 .....	2
Tabel 1.2 Perkembangan Ekspor Negara Indonesia 2013-2022 .....	4
Tabel 1.3 Perkembangan PDB Negara Indonesia 2013-2022.....	6
Tabel 1.4 Hutang Negara Indonesia Tahun 2013-2022 .....	13
Tabel 1.5 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya.....	18
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	47
Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian .....	52
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel 3.3 Sumber Data Penelitian.....	54
Tabel 4.1 KMO and Bartlett's Test .....	68
Tabel 4.2 Anti-image Matrices .....	69
Tabel 4.3 Communalities .....	70
Tabel 4.4 Total Variance Explained.....	70
Tabel 4.5 Component Matrixa .....	72
Tabel 4.6 Rotated Component Matrixa.....	73
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas Coefficientsa.....	77
Tabel 4.8 Regresi Linear Berganda Coefficientsa .....	78
Tabel 4.9 Uji -t (Uji Hipotesis Parsial) Coefficientsa .....	79
Tabel 4.10 Uji - F (Uji Hipotesis Simultan) ANOVAa.....	80
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi (R <sup>2</sup> ) Model Summaryb .....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Inflasi Negara Indonesia 2013-2022 .....	3
Gambar 1.2 Perkembangan Ekpor Negara Indonesia 2013-2022 .....	4
Gambar 1.3 Perkembangan PDB Negara Indonesia 2013-2022 .....	7
Gambar 1.4 Hutang Negara Indonesia Tahun 2013-2022 .....	13
Gambar 2.1 Kerangka <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA).....	50
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Regresi Linear Berganda .....	50
Gambar 4.1 Perkembangan Inflasi Negara Indonesia.....	66
Gambar 4.2 Scree plot Component Number .....	71
Gambar 4.3 Kerangka Konseptual Regresi Linear Berganda .....	74
Gambar 4.4 Histogram Uji Normalitas .....	75
Gambar 4.5 Normal P-P Plot Regression Standarized Residual.....	76
Gambar 4.6 scatterplot Uji Heteroskedastisitas .....	77

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tabulasi Data Penelitian.....	117
Lampiran 2 Hasil Output Pengolahan Data CFA.....	118
Lampiran 3 Hasil Output Pengolahan Data Regresi Linear Berganda .....	122

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kata inflasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*inflate*”, yang memiliki arti mengembung. Inflasi itu sendiri biasa dikatakan sebagai suatu kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus, kenaikan harga satu atau dua barang ini tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali bila kenaikan tersebut meluas terhadap barang-barang lainnya. Inflasi adalah fenomena yang selalu ada di setiap negara dan merupakan salah satu indikator penting dalam perekonomian suatu negara. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pada akhirnya akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengendalian inflasi penting untuk dilakukan karena didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Dampak negatif tersebut menjadikan inflasi sebagai salah satu penyakit ekonomi yang ada di setiap negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Padahal satu sisi inflasi dapat memberikan manfaat, sebagaimana dapat diambil contoh dari peningkatan angka inflasi di Amerika Serikat sebesar empat persen selama beberapa tahun terakhir krisis, hal tersebut secara signifikan dapat membantu proses pengurangan (*deleveraging*) utang publik maupun swasta. Namun disisi lain, kenaikan angka inflasi memaksa pemerintah untuk merevisi tingkat inflasi yang ditargetkan dan akan diikuti oleh kenaikan suku bunga. Perekonomian Amerika Serikat merupakan salah satu lokomotif perekonomian dunia. Pada tahun 2001, perekonomian Amerika Serikat mengalami perlambatan

dari pada perkiraan sebelumnya. Keadaan ini menimbulkan ketakutan akan adanya resesi global di tahun mendatang, perkiraan perlambatan perekonomian dunia ini diduga akan terus berlangsung di tahun 2002 hingga merambat ke negara lainnya termasuk Indonesia.

Namun ternyata dugaan tersebut salah karena di Indonesia pada tahun 2002 laju inflasi lebih rendah dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena menguatnya nilai tukar rupiah, kebijakan pengendalian defisit APBN yang diupayakan turun dan kebijakan moneter yang hati-hati dengan target pertumbuhan uang primer sebesar 12-13 persen.

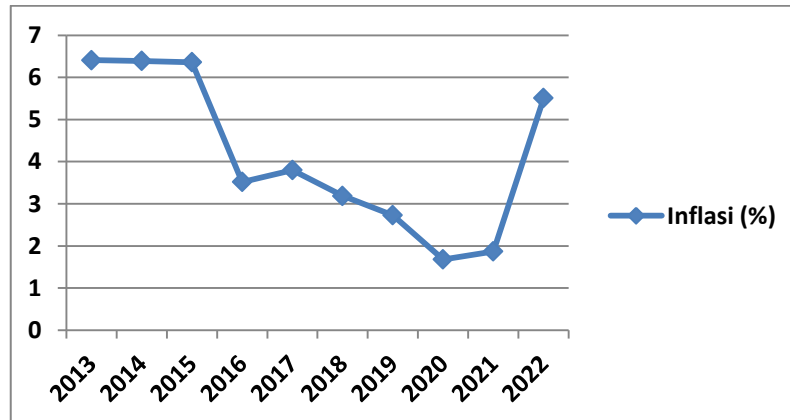
Hingga pada tahun 2013 laju inflasi kembali meningkat mencapai angka 6,41 persen, yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga bbm (bahan bakar minyak) yang terus memicu kenaikan harga angkutan umum serta kenaikan bahan makanan. Hal ini dikarenakan Krisis energi dunia yang ditandai dengan naiknya harga minyak dunia dan menjadi sebuah krisis energi untuk Indonesia. Pada tahun 2013 kenaikan harga BBM mencapai 126% dengan menetapkan harga minyak tanah sebesar Rp 2.500/liter. Sementara harga bensin premium naik menjadi Rp 6.000/liter dan minyak solar sebesar Rp 5.500/liter. Kemudian pada bulan Desember 2013 terjadi deflasi sebesar 0,04 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga pada kelompok harga bahan makanan, pendidikan, rekreasi dan olahraga.

**Tabel 1.1 Perkembangan Inflasi Negara Indonesia 2013-2022**

Tahun	Inflasi (%)
2013	6.41
2014	6.39
2015	6.36
2016	3.52
2017	3.8

2018	3.19
2019	2.73
2020	1.68
2021	1.87
2022	5.51

*Sumber : Bank Indonesia 2023*



**Gambar 1.1 Perkembangan Inflasi Negara Indonesia 2013-2022**

Data diatas terlihat tingkat inflasi menurun dari tahun 20013 sampai dengan tahun 2020, namun pada tahun 2021-2022 terus meningkat drastis mencapai angka 5,5%. Yang mengakibatkan perekonomian berada pada masalah yang serius mulai dari menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya pinjaman, dan penurunan investasi. Oleh karena itu, pemerintah biasanya berusaha untuk mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan ekonomi, seperti menaikkan suku bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar.

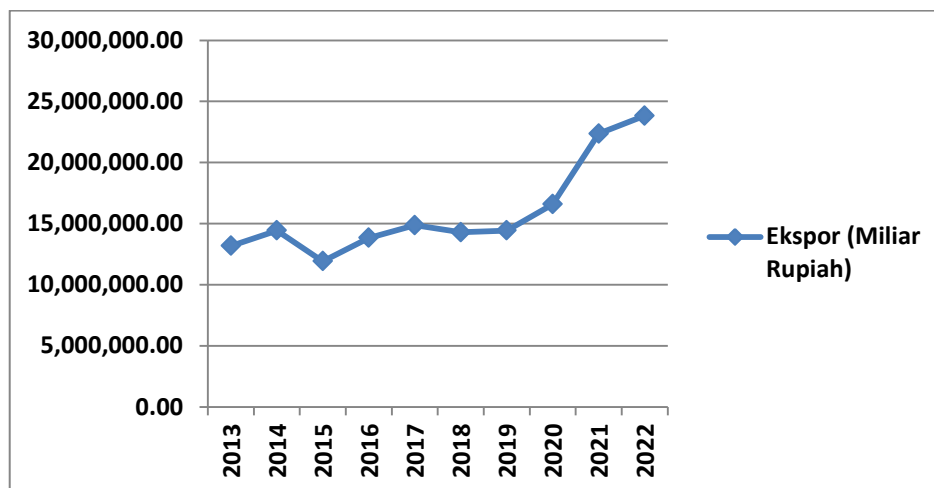
Pertumbuhan ekonomi juga mengalami titik balik, ketika harga berbagai komoditas ekspor menurun menyusul harga minyak dunia yang menurun secara drastis. Ketakutan masyarakat dunia akan terjadinya resesi telah menyebabkan menurunnya permintaan terhadap berbagai produk sehingga harga terus menurun. Akibatnya, Indonesia yang semula mengandalkan ekspor sebagai ujung tombak pertumbuhan ekonomi mulai memasuki masa sulit. Berbagai industri manufaktur

terutama yang berorientasi ekspor seperti tekstil mulai mengurangi kegiatannya termasuk mengurangi tenaga kerja karena permintaan pasar ekspor yang menurun.

**Tabel 1.2 Perkembangan Ekspor Negara Indonesia 2013-2022**

Tahun	Ekspor (Miliar Rupiah)
2013	Rp.13.169.089
2014	Rp.14.436.339
2015	Rp.11.917.112
2016	Rp.13.832.355
2017	Rp.14.864.547
2018	Rp.14.290.093
2019	Rp.14.428.818
2020	Rp.16.539.555
2021	Rp.22.357.720
2022	Rp.23.827.858

*Sumber : BPS Indonesia 2023*



**Gambar 1.2 Perkembangan Ekpor Negara Indonesia 2013-2022**

Dari data diatas terlihat peningkatan ekspor Negara Indonesia Dari tahun 2013-2022 terus meningkat, yang memberikan hal yang baik bagi perekonomian suatu Negara Indoensia, seperti meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Keresahan akan inflasi ini sering menjadi beban bagi masyarakat, seperti yang dikatakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden di Negara



Kesatuan Republik Indonesia mengatakan bahwa inflasi dianggap sebagai musuh rakyat dan sebagai musuh ekonomi yang paling besar. Hal ini dikarenakan inflasi dapat mengakibatkan lemahnya efisiensi dan produktivitas ekonomi investasi, kenaikan biaya modal serta ketidakjelasan biaya dan pendapatan di masa yang akan datang.

Melihat dari kenaikan tingkat inflasi di beberapa negara khususnya Indonesia yang makin meresahkan, maka masalah inflasi ini mendapat perhatian yang besar dari para pemerintah maupun masyarakat umum. Berbagai teori dan kebijakan dikembangkan untuk mengatasi inflasi diantaranya terdapat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Dalam tiga dekade terakhir, minat terhadap kebijakan ekonomi makro yang berdasarkan atas aturan (*rule-based policy*) ini makin mengalami peningkatan. Di area ekonomi moneter, sejak diperkenalkan di Selandia Baru, Kanada, Inggris, Swedia, dan Australia pada awal tahun 1990-an, penargetan inflasi (*inflation targeting*) telah diangkat dibanyak Negara. Sampai saat ini, tercatat 32 negara di seluruh dunia yang mengangkat penargetan inflasi dalam kerangka kerja kebijakan moneter.

Sejalan dengan kecenderungan di atas, di bidang ekonomi publik, aturan fiskal (*fiscal rule*) mendapat popularitas yang cukup besar diberbagai belahan dunia. Awalnya, didorong oleh defisit anggaran yang tinggi di tahun 1970-an, sebanyak 87 negara saat ini telah memberlakukan aturan fiskal. Aturan fiskal ini diformalkan pada pembatasan numerik dalam variabel fiskal agregat yang relevan, seperti pendapatan, pengeluaran, defisit, dan utang. Dan memiliki satu tujuan,

yaitu berusaha untuk memberikan kredibilitas terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi makro.

Kredibilitas dalam penelitian ini merujuk pada keyakinan pasar dan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan dan mempertahankan kebijakan fiskal dengan konsistensi dan efektivitas. Kebijakan fiskal yang dianggap kredibel dapat meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, termasuk investor dan konsumen, dengan alat ukur tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, seperti pengeluaran pemerintah, pendapatan pajak, dan utang publik. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi inflasi karena pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi permintaan agregat di pasar.

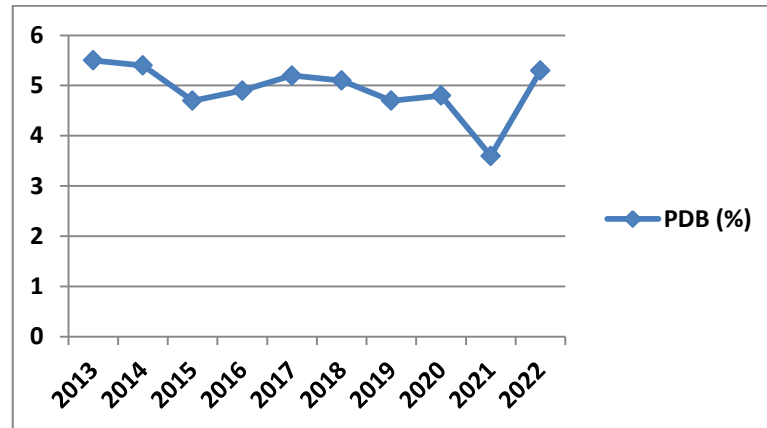
Di Indonesia, kebijakan fiskal sering digunakan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, kebijakan fiskal yang tidak kredibel dapat memicu inflasi dan merusak stabilitas ekonomi. Hal ini dapat terjadi jika kebijakan fiskal tidak dijalankan secara konsisten atau tidak sesuai dengan target inflasi yang telah ditetapkan. (kemenkeu.go.id, 2022)

**Tabel 1.3 Perkembangan PDB Negara Indonesia 2013-2022**

Tahun	PDB (%)
2013	5,5
2014	5,4
2015	4,7
2016	4,9
2017	5,2
2018	5,1
2019	4,7
2020	4,8

2021	3,6
2022	5,3

*Sumber : World Bank 2023*



**Gambar 1.3 Perkembangan PDB Negara Indonesia 2013-2022**

Dari data diatas terlihat pada tahun 2013-2014 PDB Indonesia tumbuh cukup stabil dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,5% per tahun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mendukung investasi dan konsumsi domestik. Di tahun 2015-2016 Pertumbuhan PDB Indonesia sedikit melambat pada periode ini, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,9% per tahun. Hal ini disebabkan oleh melemahnya harga komoditas dan perlambatan ekonomi global. Di tahun 2017-2018 Pertumbuhan PDB Indonesia kembali membaik pada periode ini, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5,2% per tahun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang lebih pro-investasi dan reformasi struktural. Tahun 2019-2020 pertumbuhan PDB Indonesia mengalami sedikit perlambatan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,7% per tahun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh adanya ketidakpastian global, terutama perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020. Dan di tahun 2021-2022 pertumbuhan PDB Indonesia kembali membaik sebesar 5,3% setelah pandemi COVID-19 mereda dan

perekonomian global pulih. Namun, fluktuasi harga komoditas dan situasi politik dalam negeri masih dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Meskipun terjadi fluktuasi dalam pertumbuhan PDB Indonesia selama beberapa tahun terakhir, namun perekonomian Indonesia masih memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi, memperkuat sektor industri dan infrastruktur, serta meningkatkan investasi dan kerja sama internasional untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Salah satu contoh dampak negatif kebijakan fiskal terhadap inflasi di Indonesia terjadi pada tahun 2018, ketika pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk membiayai program infrastruktur dan pelayanan publik. Kebijakan ini dianggap kurang kredibel oleh pasar keuangan karena tidak disertai dengan pengurangan belanja lain atau peningkatan pendapatan pajak. Akibatnya, terjadi tekanan inflasi yang cukup signifikan pada tahun 2018 dan 2019.

Kebijakan fiskal yang tidak kredibel dapat mempengaruhi ekspektasi inflasi di pasar, sehingga mendorong kenaikan harga dan merusak kestabilan harga jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diambil konsisten dengan target inflasi dan mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus memperkuat koordinasi kebijakan antara bank sentral dan pemerintah untuk mencapai tujuan inflasi yang stabil dan rendah.

Krisis keuangan global yang terjadi pada pertengahan tahun 2008 memberikan tantangan tersendiri terhadap aturan kebijakan tersebut yang menimbulkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Fakta menunjukkan bahwa banyak negara berkembang dan negara maju mengalami defisit anggaran yang tinggi dan utang publik tidak berkelanjutan. Posisi fiskal yang tidak berkelanjutan memiliki dampak negatif pada tingkat bunga pasar sehingga dampak berikutnya adalah kenaikan ekspektasi inflasi dan pada akhirnya berpengaruh kepada tingkat inflasi itu sendiri.

Cara membiayai defisit anggaran yang tinggi salah satunya dengan melakukan pencetakan uang (*printing money*), namun pencetakan uang (*printing money*), pada tingkat yang melebihi permintaan menciptakan kelebihan saldo kas atau uang beredar ditangan masyarakat, dan hal ini dapat juga menimbulkan inflasi yang tinggi, sehingga pencetakan uang (*printing money*) tidak diperbolehkan dalam membiayai defisit anggaran. Dalam Perekonomiannya Indonesia pada akhir tahun 2012 menunjukkan adanya defisit anggaran meskipun masih dalam skala rendah, A. Tony Prasetyantono sebagai kepala pusat studi ekonomi dan kebijakan publik Universitas Gajah Mada menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin defisit akan melebar sehingga cadangan devisa akan terkuras dan melemahkan nilai rupiah, selanjutnya inflasi akan naik terutama dikarenakan kenaikan barang impor.

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, presiden selaku kepala pemerintahan di negara Indonesia memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pada setiap awal tahun anggaran, dalam pidatonya presiden menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk satu tahun yang akan datang di depan sidang MPR/DPR. Salah satu materi penting yang disampaikan adalah besaran belanja pegawai pemerintah dalam

RAPBN yang diperkirakan menjadi penyebab dalam defisit anggaran, karena menyangkut hajat hidup para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia.

Kemudian dari sisi penerimaan di sektor pajak, banyak oknum yang melakukan korupsi terhadap pajak sehingga mengakibatkan kurangnya pendapatan dan berujung pada tingginya defisit anggaran, wakil ketua KPK bidang penindakan Bambang widjojanto menyatakan bahwa: “tindak pidana yang dilakukan koruptor telah mengambil hak-hak sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, pemiskinan koruptor lewat penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPU) dapat mencegah inflasi”. Banyaknya tindak korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah, karena kurangnya kedisiplinan dalam kebijakan fiskal dan hal ini yang menjadi salah satu alasan rendahnya kebijakan fiskal dalam mengatasi masalah ekonomi, sehingga kebijakan moneter lebih dipercaya dalam mengatasi masalah ekonomi makro tersebut. (Arifin, 2018)

Seperti banyak literatur ekonomi Klasik menyarankan bahwa inflasi adalah masalah moneter sehingga penanggulangannya ditempuh melalui kebijakan moneter. Dalam kasus krisis finansial global, kebijakan moneter dengan menetapkan suku bunga rendah (*zero lower bound*) ternyata tidak menyelesaikan masalah inflasi. Secara teori, penargetan inflasi mensyaratkan adanya sistem kurs bebas. Dalam perekonomian dengan pergerakan modal yang bebas, gejolak kurs menjadi harga yang harus dibayar. Melihat kenyataan tersebut, masalah inflasi akan lebih banyak dibebankan pada kebijakan fiskal. Statement standard dari menteri keuangan Negara Indonesia mengatakan bahwa: “kondisi inflasi yang

cenderung tinggi pasti harus disikapi dengan bauran kebijakan moneter dan didukung oleh kebijakan fiskal”. (CNN-Indonesia, 2022)

Namun, dalam lingkungan inflasi tinggi, belanja fiskal akan meningkatkan ekspektasi inflasi dan biaya pinjaman, yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan fiskal. Dalam ketidakpastian tersebut, efek kepercayaan cenderung menjadi lebih penting dan bagaimana cara merespon akan sangat tergantung pada kebijakan pemerintah dan kredibilitasnya. Kebijakan yang konsisten dan kredibel adalah keputusan yang tidak berubah-ubah setiap saat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan itu sendiri.

Kredibilitas kebijakan fiskal telah banyak disebut-sebut sebagai salah satu dasar yang paling penting dari kebijakan ekonomi makro. Secara umum, dapat diterima secara luas bahwa pemerintah dengan reputasi kuat dan menempuh kehati-hatian fiskal tidak perlu dibatasi oleh aturan. Pemerintah memiliki kredibilitas fiskal yang buruk di dalam pengeluaran anggaran. Kebanyakan pengeluaran anggaran pemerintah digunakan untuk belanja rutin negara misalnya digunakan untuk gaji pegawai negeri yang telah dijelaskan sebelumnya, kemudian untuk subsidi minyak, dan pembayaran bunga utang. Hal ini dapat mencerminkan kurangnya disiplin fiskal, yang pada umumnya berasal dari penggunaan diskresioner kebijakan fiskal.

Ketidakpastian terhadap arah kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dapat memicu kekhawatiran dan tidak percaya terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas moneter, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi, tingginya tingkat utang pemerintah dapat memicu kekhawatiran di pasar keuangan dan memicu inflasi., tingginya tingkat utang pemerintah dapat memicu kekhawatiran di pasar

keuangan dan memicu inflasi, rendahnya transparansi kebijakan fiskal pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah, ketidakpercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan investor dan masyarakat dan di tambah lagi masyarakat cenderung menaikkan harga barang dan jasa untuk melindungi diri dari potensi inflasi yang lebih tinggi. (Kemenkeu, 2021)

Kebijakan diskresioner memang mampu merespon guncangan yang tak terduga, namun demikian kebijakan diskresioner juga dapat menjadi salah sasaran, sehingga defisit terus-menerus dan kebijakan mengarah pada pro-siklikal, meningkatnya tingkat utang, dan dari waktu ke waktu akan kehilangan kredibilitasnya. Pada akhirnya jika tidak ada kredibilitas, kebijakan fiskal menjadi tidak berkelanjutan (*sustainable*) akan berdampak pula pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Utang yang meningkat di tengah ketidakstabilan perekonomian global akan membuat tekanan terhadap anggaran. Utang bukan solusi untuk meredam tekanan fiskal, justru utang berpotensi mengurangi kredibilitas kebijakan pemerintah dimata publik jika tidak digunakan dengan optimal. Pada saat yang sama peningkatan tajam dalam defisit fiskal dan utang publik telah menimbulkan kekhawatiran tentang keberlanjutan keuangan publik dan menyoroti kebutuhan untuk penyesuaian yang signifikan dalam jangka menengah. Menurut UU No. 17/2003, sejak tahun 2004 Indonesia telah menerapkan aturan kebijakan fiskal berdasarkan defisit dan utang (maksimal masing-masing 3 dan 60 persen dari

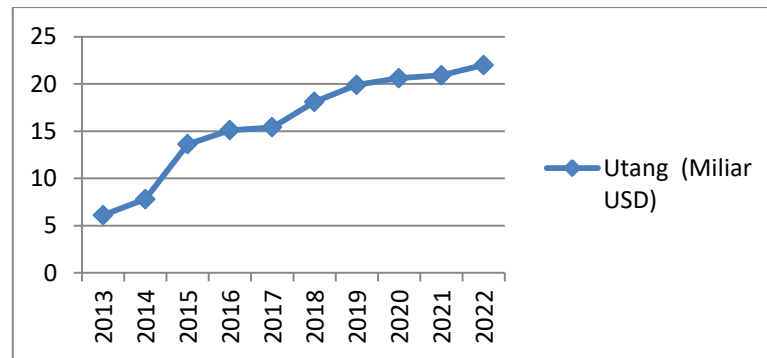


PDB) menggantikan aturan anggaran berimbang yang telah dilaksanakan sejak tahun 1967.

**Tabel 1.4 Hutang Negara Indonesia Tahun 2013-2022**

Tahun	Utang (Miliar USD)
2013	6,1
2014	7,8
2015	13,6
2016	15,1
2017	15,4
2018	18,1
2019	19,9
2020	20,6
2021	20,9
2022	22

*Sumber : World Bank 2023*



**Gambar 1.4 Hutang Negara Indonesia Tahun 2013-2022**

Dari data diatas terlihat peningkatan utang negara dari tahu 2013-2022 terus meningkat yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, program sosial, dan kebutuhan lainnya yang dibiayai oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah Indonesia berupaya untuk mengelola utang ini dengan baik dan memastikan bahwa utang tersebut dapat digunakan secara produktif untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berupaya untuk menjamin keberlanjutan keuangan dengan mengurangi risiko yang terkait dengan utang dan meningkatkan penerimaan negara.

Pemerintah berusaha untuk mempertahankan kegiatan ekonomi melalui berbagai langkah stimulus fiskal guna menghadapi dampak negatif dari krisis keuangan global. Bahkan, program stimulus fiskal telah memberikan kontribusi besar terhadap Indonesia. Melihat hal tersebut masalah dalam ekonomi makro ini lebih banyak diperankan oleh kebijakan fiskal dari pada kebijakan moneter atau *inflation targeting* oleh bank sentral. Namun uniknya, aturan tersebut belum diuji. Padahal, kinerja fiskal Indonesia telah secara signifikan lebih baik dari batas yang terkandung dalam aturan fiskal. Bukti-bukti empiris secara internasional menunjukkan bahwa aturan fiskal dapat memberikan kerangka yang berguna untuk kebijakan fiskal dan akhirnya dapat berkontribusi terhadap inflasi di Indonesia. Namun kredibilitas dari kebijakan fiskal di Indonesia masih kurang diminati oleh publik.

Fakta tersebut membawa kita kembali pada tantangan target inflasi dalam teori secara dominan, yang biasanya diam tentang peran kebijakan fiskal yang kredibel dan hal itu dapat menjadi perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, kredibilitas kebijakan fiskal telah banyak disebutkan sebagai salah satu dasar yang paling penting dari kebijakan makroekonomi, anehnya aturan tersebut belum diuji.

Melihat bahwa rendahnya kredibilitas kebijakan fiskal saat terjadi inflasi, maka penelitian ini sangat penting untuk diteliti karena untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas kebijakan fiskal mampu memberikan dampak positif terhadap masalah dalam makro ekonomi terutama inflasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia inflasi yang terjadi lebih dipercaya dengan kebijakan moneter, sementara kebijakan fiskal yang ada kurang dipercayai oleh publik, sehingga peneliti menjadikan inflasi sebagai variabel terikat yang akan diteliti dengan

kredibilitas kebijakan fiskal sebagai variabel bebas. Dan tingkat kredibilitas kebijakan fiskal pada penelitian ini mencakup nilai kredibilitas kebijakan fiskal pada aturan defisit anggaran, aturan utang, kebijakan fiskal diskresioner, dan keterbukaan ekonomi (*openness*).

Berdasarkan data dan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam dengan judul **“Dampak Kredibilitas Kebijakan Fiskal Terhadap Inflasi Di Indonesia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti mengidentifikasi masalah yang ada yaitu :

1. Ketidakpastian terhadap arah kebijakan fiskal yang diambil oleh pemerintah dapat memicu kekhawatiran dan tidak percaya terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas moneter, yang pada gilirannya dapat memicu inflasi.
2. Tingginya tingkat utang pemerintah dapat memicu kekhawatiran di pasar keuangan dan memicu inflasi.
3. Rendahnya transparansi kebijakan fiskal pemerintah dapat menimbulkan ketidakpastian di pasar keuangan dan mempengaruhi kredibilitas pemerintah.
4. Ketidakpercayaan pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal dapat menimbulkan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan investor dan masyarakat.

5. Masyarakat cenderung menaikkan harga barang dan jasa untuk melindungi diri dari potensi inflasi yang lebih tinggi.

### **C. Batasan Masalah**

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah inflasi memiliki penyebab yang sangat luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti dari segi waktu maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah dampak kredibilitas kebijakan fiskal yang ditinjau dari faktor pajak, pengeluaran pemerintah, nilai tukar, utang, investasi, ekspor, suku bunga dan inflasi di Indonesia.

### **D. Rumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dampak kredibilitas kebijakan fiskal (pajak) terhadap inflasi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak kredibilitas fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap inflasi di Indonesia?
3. Bagaimana dampak suku bunga terhadap inflasi di Indonesia?
4. Bagaimana dampak investasi terhadap inflasi di Indonesia?
5. Bagaimana dampak nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia?
6. Bagaimana dampak ekspor terhadap inflasi di Indonesia?
7. Bagaimana dampak hutang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia?
8. Apakah faktor pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi, nilai tukar, ekspor dan hutang luar negeri berdampak secara bersama-sama terhadap inflasi di Indonesia?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak kredibilitas kebijakan fiskal (pajak) terhadap inflasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak kredibilitas fiskal (pengeluaran pemerintah) terhadap inflasi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dampak suku bunga terhadap inflasi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui dampak investasi terhadap inflasi di Indonesia.
5. Untuk mengetahui dampak nilai tukar terhadap inflasi di Indonesia.
6. Untuk mengetahui dampak ekspor terhadap inflasi di Indonesia.
7. Untuk mengetahui dampak hutang luar negeri terhadap inflasi di Indonesia.
8. Untuk mengetahui faktor pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi, nilai tukar, ekspor dan hutang luar negeri berdampak secara bersama-sama terhadap inflasi di Indonesia.

### **F. Manfaat Penelitian**

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaatnya sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan, dan pengetahuan baru serta untuk referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang kredibilitas kebijakan fiskal terhadap inflasi yang ada di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan agar pemerintah Indonesia mampu meningkatkan perannya di dalam kebijakan fiskal khususnya

untuk mengendalikan inflasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat publik terhadap kebijakan yang di ambil oleh pemerintah khususnya dalam kebijakan fiskal, serta dapat menumbuhkan derajat kredibilitas masyarakat terhadap kebijakan fiskal pada saat terjadinya ketidakstabilan harga.

### G. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Heru Setiawan 2018) dengan skripsi judul “**Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makro Ekonomi Di Indonesia Dengan Model Structural Vector Autoregression (SVAR)**” program ekonomi dan bisnis, Univesitas Sumatera Utara Medan.

Sedangkan penelitian ini berjudul “**Dampak Kredibilitas Kebijakan Fisikal Terhadap Inflasi Di Indonesia**”. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan sebelumnya yang dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1.5 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya**

<b>Perbandingan</b>	<b>Penelitian Terdahulu</b>	<b>Penelitian Sekarang</b>
Variabel	Variabel Dependen: 1. Kinerja Makro ekonomi Variabel Independen: 1. Belanja Pemerintah 2. PDB 3. Suku Bunga 4. Inflasi 5. Pemerimaan Pajak	Variabel Dependen: 1. Inflasi Variabel Independen : 1. Pajak 2. Pengeluaran Pemerintah 3. Suku Bunga 4. Investasi 5. Nilai Tukar 6. Ekspor 7. Hutang Luar Negeri
Metode Analisis	Analisis Structural Equationss Modelling	CFA ( <i>Confirmatory Factor Analysis</i> ) Regresi Linear Berganda
Lokasi	Negara Indonesia	Negara Indonesia
Jumlah Sampel Tahun	19 Tahun	10 Tahun
Tahun	2019	2024

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Grand Theory : Efektifitas Kebijakan Moneter Dan Fiskal**

Grand theory pada umumnya adalah teori-teori makro yang mendasari berbagai teori di bawahnya. Disebut grand theory karena teori tersebut menjadi dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Grand Theory disebut juga teori makro karena teori-teori ini berada di level makro, bicara tentang struktur dan tidak berbicara fenomena-fenomena mikro. Dengan demikian grand theory dapat disebut sebagai teori keseluruhan atau teori secara garis besar yang menjelaskan suatu permasalahan atau kasus. Adapun grand theory dalam penelitian ini adalah :

Kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa Depresiasi Besar (*Great Depression*) terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara.

Teori efektifitas kebijakan fiskal dan moneter dipelopori oleh teori Keynes dan teori Aliran Moneteris. Kedua teori ini memiliki pandangan yang berbeda tentang efektifitas kebijakan fiskal maupun moneter terhadap output dalam suatu perekonomian. Teori Keynes melihat bahwa dampak kebijakan moneter terhadap perekonomian tidak kuat bahkan lemah. Kondisi ini dikarenakan adanya beberapa jalur (mekanisme transmisi) yang

harus dilewati oleh efek kebijakan moneter 2 terhadap perekonomian. Efek kebijakan moneter yang melalui beberapa jalur ini membuat pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian menjadi tidak pasti. Disamping itu, teori Keynes memandang bahwa hubungan antara permintaan uang dan tingkat bunga mempunyai sifat elastisitas sempurna. Pada kondisi ini peningkatan jumlah uang beredar tidak akan berdampak apa-apa terhadap peningkatan ataupun penurunan output. Justru kebijakan fiskallah yang dipandang oleh teori Keynes mempunyai kekuatan dalam mempengaruhi output. Terjadinya ekspansif fiskal pada saat hubungan antara permintaan uang dan tingkat bunga elastisitas sempurna membuat kurva IS akan bergerak ke kanan sehingga berdampak terhadap naiknya output dalam suatu perekonomian. Oleh sebab itu, teori Keynes meyakini bahwa kebijakan fiskallah yang lebih efektif dalam mempengaruhi output suatu perekonomian jika dibandingkan dengan kebijakan moneter (Romer, 2011).

Sedangkan teori Aliran Moneteris (Neo-klasik) lebih meyakini bahwa kebijakan moneterlah yang lebih efektif dalam mempengaruhi output dalam suatu perekonomian. Kondisi ini didasarkan pada analisis bahwa kebijakan moneter mempunyai pengaruh yang bersifat langsung terhadap permintaan agregat. Ketika ada penambahan uang dalam perekonomian, pelaku ekonomi akan langsung membelanjakannya dalam bentuk barang bukan membelanjakannya dalam bentuk surat berharga. Teori Moneteris justru memandang bahwa kebijakan fiskallah yang tidak efektif dalam mempengaruhi output pada suatu perekonomian. Hal ini disebabkan oleh ekspansif fiskal menimbulkan adanya efek crowding out. Efek crowding out



ini membuat penambahan fiskal tidak berdampak apa-apa terhadap output dalam perekonomian (Romer, 2011)

Dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu.

Penerapan kebijakan fiskal di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, melalui *Indische Comptabiliteitswet* tahun 1944. Undang-undang tersebut kemudian diadaptasi pemerintah guna menyusun kebijakan fiskal di Indonesia mulai Proklamasi sampai tahun 1997 - 2003.

Pasca tahun 2003 hingga saat ini, kebijakan fiskal di Indonesia sudah tidak disadur lagi dari ICW 1944, melainkan berdasarkan pada analisa perekonomian negara dengan berlandaskan pada UUD 1945. Pihak yang memiliki wewenang membuat kebijakan fiskal di Indonesia adalah Kementerian Keuangan RI bersama-sama dengan Presiden.

Ada beberapa tujuan kebijakan fiskal diciptakan. Selengkapnya tentang tujuan kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

- a) Menjaga dan Mengembangkan Perekonomian Negara adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan

memperbaikimasalah di dalamnya, mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro.

- b) Meningkatkan Kualitas SDM adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga bisa meningkat kesejahteraan hidupnya.
- c) Menjaga Stabilitas Harga Barang yaitu ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggungjawab.
- d) Mendorong Investasi adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor. Sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang terbagi menjadi beberapa kategori. Selengkapnya tentang jenis kebijakan fiskal adalah sebagai berikut:

- a) Dari Segi Teoretis, kebijakan fiskal di Indonesia terbagi 3, yaitu kebijakan fiskal fungsional, terencana, dan insidental.
  - Kebijakan Fiskal Fungsional adalah kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro, dengan

dampak yang baru terlihat dalam jangka panjang. Contoh kebijakan fiskal fungsional misalnya pemberian beasiswa kuliah, bantuan pendanaan start-up, dan sebagainya.

- Kebijakan Fiskal Disengaja/Terencana adalah kebijakan manipulasi anggaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi dan krisis ekonomi. Contoh kebijakan fiskal disengaja adalah alokasi APBN bagi sektor kesehatan di masa pandemi dan relaksasi pajak usaha.
  - Kebijakan Fiskal Tak Disengaja/Insidental yaitu kebijakan berupa penetapan keputusan/aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah, contohnya penetapan harga eceran tertinggi.
- b) Dari Segi Penerapan ada 2, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif.
- Kebijakan Fiskal Ekspansif adalah kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak bagi sektor tertentu. Fungsi kebijakan fiskal ekspansif adalah demi meningkatkan daya beli barang, sehingga perusahaan tetap bisa melakukan produksi tanpa memecat pekerja.
  - Kebijakan Fiskal Kontraktif adalah kebijakan fiskal kontraktif, kebijakan menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan

pajak. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah untuk mencegah inflasi dan mengurangi rasio gini.

c) Dari Segi Neraca Pembayaran terbagi 4, yaitu kebijakan fiskal seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.

- Kebijakan Fiskal Seimbang untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Fungsi kebijakan fiskal satu ini adalah agar negara tidak punya terlalu banyak hutang. Meski terdengar positif, regulasi fiskal seimbang memiliki risiko besar, karena tidak semua negara punya kemampuan memenuhi seluruh kebutuhan warganya.
- Kebijakan Fiskal Surplus adalah jenis kebijakan fiskal yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal surplus adalah demi mencegah terjadinya inflasi.
- Kebijakan Fiskal Defisit adalah regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Salah satu contoh kebijakan fiskal defisit adalah utang luar negeri.
- Kebijakan Fiskal Dinamis adalah regulasi fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkan.

## 2. Middle Theory : Kuantitas Uang, Permintaan Agregat, Biaya, Antisipasi Dan Inflasi Keterlambatan.

### a) Kuantitas Uang (*Quantity of Money*)

Teori ini menyatakan bahwa tingkat inflasi secara langsung terkait dengan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dalam teori ini, jika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat daripada peningkatan produksi barang dan jasa, maka inflasi akan meningkat.

Rumus kuantitas uang:

$$MV = PT$$

Di mana :

M = jumlah uang,

V = kecepatan sirkulasi uang,

P = tingkat harga,

T = jumlah barang dan jasa yang dihasilkan.

### b) Permintaan Agregat (*Demand-Pull*)

Teori ini menyatakan bahwa inflasi disebabkan oleh meningkatnya permintaan agregat (total permintaan) di atas kapasitas produksi penuh. Ketika permintaan konsumen dan investasi meningkat, tanpa diikuti peningkatan dalam produksi, harga cenderung naik.

### c) Biaya (*Cost-Push*)

Teori ini berpendapat bahwa inflasi terjadi ketika biaya produksi meningkat. Faktor-faktor seperti kenaikan upah tenaga kerja, harga bahan baku, atau pajak dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi. Akibatnya, produsen akan menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi biaya tambahan tersebut.

**d) Antisipasi (*Rational Expectations*)**

Teori ini menekankan peran ekspektasi atau antisipasi para pelaku ekonomi terhadap inflasi di masa depan. Jika para pelaku ekonomi mengharapkan inflasi di masa depan, mereka cenderung menyesuaikan perilaku mereka saat ini, seperti menaikkan harga barang dan jasa atau menuntut kenaikan upah, yang dapat menyebabkan inflasi sesuai dengan ekspektasi mereka.

**e) Inflasi Keterlambatan (*Lagging Inflation*)**

Teori ini berpendapat bahwa efek kebijakan moneter atau fiskal terhadap inflasi tidak instan dan memerlukan waktu untuk berdampak. Kenaikan permintaan atau pengeluaran dapat mempengaruhi tingkat harga dengan keterlambatan, sehingga inflasi tidak selalu segera terjadi setelah kebijakan dilaksanakan.

**3. Applied Theory : Inflasi, Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Suku Bunga, Investasi, Nilai Tukar, Ekspor dan Hutang Luar Negeri.**

**1) Inflasi**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, teori kuantitas uang berhubungan dengan hubungan antara jumlah uang yang beredar di perekonomian dengan tingkat inflasi. Teori ini berpendapat

bahwa jika jumlah uang yang beredar meningkat lebih cepat daripada pertumbuhan output ekonomi riil, maka akan terjadi inflasi.

Permintaan Agregat, teori ini menyoroti peran permintaan agregat (total permintaan barang dan jasa) dalam menyebabkan inflasi. Inflasi dapat terjadi jika permintaan agregat melebihi kapasitas produksi penuh ekonomi. Ketika permintaan lebih besar daripada pasokan, produsen dapat menaikkan harga produk mereka untuk memanfaatkan situasi tersebut.

Biaya (*Cost-Push Inflation*), teori biaya berfokus pada peran biaya produksi dalam mendorong inflasi. Inflasi dapat dipicu oleh peningkatan biaya produksi, seperti lonjakan harga bahan baku atau lonjakan upah pekerja. Produsen, untuk mengkompensasi biaya yang lebih tinggi, akan menaikkan harga barang dan jasa, yang pada gilirannya berkontribusi pada inflasi.

## **2) Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

## **3) Pengeluaran Pemerintah**

Teori Rostow dan Musgrave mengemukakan bahwa terdapat tiga tahapan dalam pembangunan ekonomi di suatu negara, yakni tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut yang mana ketiga tahapan

tersebut kemudian dihubungkan dengan pengeluaran pemerintahnya. Teori makro pengeluaran pemerintah menjelaskan mengenai perhitungan panjang pertumbuhan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah (Bailey, 1995).

#### **4) Suku Bunga**

Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman berbagai pelaku ekonomi di pasar. Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga (secara makro) yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang, dengan demikian bunga adalah harga kredit. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan waktu didalam kegiatankegiatan ekonomi.

Tingkat suku bunga muncul dari kegemaran untuk mempunyai uang sekarang. Teori klasik menyatakan bahwa bunga adalah harga dari loanable funds (dana investasi) dengan demikian bunga adalah harga yang terjadi di pasar dan investasi. Menurut teori Keynes tingkat bunga merupakan suatu fenomena moneter. Artinya tingkat bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang (ditentukan di pasar uang).

#### **5) Investasi**

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif (Sutha, 2000). Investasi adalah penanaman uang dengan harapan mendapat hasil dan nilai tambah (Webster, 1999). Menurut Lypsey (1997), investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat



ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi.

#### **6) Nilai Tukar**

Aristoteles mendefinisikan nilai tukar (*value in exchange*) adalah sebagai kemampuan dari barang untuk dilakukan pertukaran dengan barang lainnya di pasar. Nilai tukar dalam manajemen keuangan didefinisikan sebagai suatu tingkatan dari mata uang yang akan dilakukan pertukaran dengan mata uang lainnya. Nilai tukar pada masa masyarakat sederhana dapat ditentukan dari banyak dan sedikitnya produktifitas atau kerja manusia dalam menghasilkan suatu barang atau jasa.

Menurut David K. Elteman, et al mendefinisikan nilai tukar sebagai sebuah harga dari suatu mata uang yang didasarkan menurut pada mata uang lainnya. Sedangkan menurut M. Faisal (2017) nilai tukar adalah harga dari satu mata uang yang dinyatakan terhadap mata uang yang lainnya.

#### **7) Ekspor**

Menurut Adrian (2014) kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain,

termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu. Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, di mana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian.

#### **8) Hutang Luar Negeri**

Secara teoritis utang luar negeri dapat diterangkan melalui pendapatan nasional. Utang luar negeri merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, utang luar negeri juga dibutuhkan untuk menutupi 3 defisit, yaitu kesenjangan investasi, defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan (Basri dalam Wibowo, 2012). Menurut Todaro (1998) utang luar negeri merupakan total dari seluruh pinjaman secara resmi dalam bentuk uang tunai maupun bentuk aktiva lainnya. Selain itu, untuk mengalirkan dana dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang untuk merealisasikan pembangunan untuk mendistribusikan pendapatan.

#### **4. Inflasi**

Inflasi adalah fenomena yang sering terjadi pada negara yang sedang berkembang bahkan di Negara Maju. Inflasi memiliki dampak yang sangat luas dalam perekonomian makro. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan memburuknya distribusi pendapatan, menambah angka kemiskinan, mengurangi tabungan domestik, menyebabkan defisit neraca perdagangan,

menggelembungkan besaran utang luar negeri serta menimbulkan ketidakstabilan politik.

John Maynard Keynes mengemukakan bahwa tindakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran publik dalam situasi resesi atau kurangnya permintaan dapat merangsang sektor swasta dan menciptakan efek berganda dalam perekonomian. Dalam konteks kebijakan fiskal, peningkatan pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat, mendorong konsumsi dan investasi swasta, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika kapasitas produksi perekonomian tidak dapat mengimbangi peningkatan permintaan ini, maka harga barang dan jasa dapat naik, dan hal ini berpotensi menyebabkan inflasi.

Teori siklus konjunktur menyatakan kebijakan fiskal dapat berinteraksi dengan siklus konjunktur ekonomi. Dalam fase ekspansi siklus, ketika perekonomian tumbuh dengan cepat, kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan inflasi. Namun, dalam fase resesi atau perlambatan ekonomi, kebijakan fiskal yang mengarah pada stimulus dapat membantu mengurangi risiko deflasi.

Pada awalnya Inflasi diartikan sebagai kenaikan Jumlah Uang Beredar atau kenaikan likuiditas dalam suatu perekonomian. Pengertian tersebut mengacu pada gejala umum yang ditimbulkan oleh adanya kenaikan Jumlah Uang Beredar yang diduga telah menyebabkan adanya kenaikan harga - harga. Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

Dengan demikian angka Inflasi juga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pencapaian beberapa tujuan kebijakan makro, seperti Pertumbuhan Ekonomi, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan keseimbangan neraca pembayaran. Hal ini dapat memicu munculnya tingkat Inflasi yang sangat serius (Sukirno, 2004). Menurut (Ramadhani, 2020) Inflasi merupakan suatu keadaan di mana perekonomian suatu negara terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan arus uang dan barang, kenaikan harga ini sifatnya hanya sementara atau disebabkan ketika Jumlah Uang Beredar lebih banyak dibandingkan yang dibutuhkan. Berikut ini salah satu teori mengenai Inflasi:

- 1) Teori Kuantitas (Persamaan Pertukaran dari Irving Fisher :  $MV = PQ$ ). Pada teori ini menjelaskan bahwa persentase kenaikan harga hanya akan sebanding dengan kenaikan Jumlah Uang Beredar atau sirkulasi uang. Namun teori kuantitas ini merupakan teori yang paling tua dalam mengenai Inflasi. Akan tetapi teori ini masih sangat berguna dalam menerangkan proses Inflasi pada zaman modern khususnya di negara yang sedang berkembang. Pada teori ini mengatakan bahwa penyebab Inflasi adalah :
  - a) Bertambahnya Jumlah Uang Beredar (JUB)
  - b) Ekspektasi (*expectations*) dimasa mendatang akan kenaikan harga-harga

Pengukuran angka Inflasi menggunakan indeks harga. Indeks harga biasa digunakan untuk mengukur Inflasi seperti indeks biaya hidup (*customer price index*), indeks harga perdagangan besar (*wholesale price*

*index*) dan GNP deflator. Menghitung indeks biaya hidup yaitu dengan menggunakan biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dibeli oleh rumah tangga dalam keperluan hidup. Besarnya angka Inflasi diperoleh melalui besarnya persentase kenaikan indeks biaya hidup tersebut. Oleh karena itu untuk mengukur laju kenaikan tingkat harga atau Inflasi dapat digunakan rumus umum sebagai berikut :

$$I_t = \frac{HUt - HUt-1}{HUt-1}$$

**Dimana:**

$I_t$  : Tingkat Inflasi pada periode (atau tahun)

$HUt$  : Harga umum aktual pada periode t

$HUt-1$  : Harga umum aktual pada periode t-1.

Indeks perdagangan besar pengukuran laju Inflasi menggunakan jumlah barang. Dalam perhitungannya termasuk harga bahan mentah, bahan baku, dan harga barang jadi. Pengukuran Inflasi dengan GNP deflator yakni dengan perhitungan nilai barang dan jasa yang termasuk dalam perhitungan pendapatan nasional bersih (GNP). Oleh karena itu berikut ini rumus perhitungan GNP deflator adalah sebagai berikut :

$$\text{GNP deflator} = \frac{GNPNominal}{GNPRiil} \times 100 \dots \dots \dots (2.1)$$

Berdasarkan sifat atau tingkat keparahannya Inflasi terbagi menjadi 4 yaitu :

- Inflasi rendah yaitu kurang dari 10% dalam pertahun.
- Inflasi sedang yaitu 10-30%. Inflasi ini ditandai dengan kenaikan harga-harga secara cepat dan relative besar.
- Inflasi berat yaitu antara 30% hingga 100% dalam pertahun.
- Inflasi sangat tinggi yaitu Inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga diatas 100%.

Selain itu berdasarkan asalnya Inflasi terbagi menjadi 2 yaitu Inflasi yang berasal dari dalam negara dan luar negeri. Inflasi dari dalam negeri terjadi karena adanya pembiayaan belanja negara dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga bahan pangan menjadi mahal dan melonjak. Sementara itu, Inflasi dari luar negeri yaitu Inflasi yang terjadi akibat meningkatnya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang diluar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang.

## **5. Pajak**

Pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara didalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak itu adalah pungutan yang dikenakan kepada rakyat sebagai iuran wajib untuk negara dari pendapatan seseorang atau dari yang perdagangkan.

Sedangkan menurut Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Ismawan pajak adalah iuran kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (Contra Prestasi) yang langsung dapat di tujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum penarikan penarikan pajak secara yuridis dapat dipaksakan atau ditagih secara paksa oleh aparat yang berwenang. Apabila utang pajak tidak dibayar oleh wajib pajak (WP) dalam jangka waktu tertentu maka penagihan dapat dilakukan secara kekerasan seperti melalui surat paksa, sita, lelang dan sandra.

Dan secara umum dapat dikatakan pajak adalah pungutan dari masyarakat kepada negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **6. Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. Pembelanjaanpembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. (Sukirno, 2004). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan ke dalam dua golongan yaitu :

1. Pengeluaran Rutin Pengeluaran rutin adalah pengeluaran yang secara rutin dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya dalam rangka penyelenggaraan dan pemeliharaan roda pemerintahan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan.
2. Pengeluaran Pembangunan Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk pembangunan fisik dan non fisik dalam rangka menambah modal masyarakat.

Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2020), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja



Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang pemerintah lakukan, yaitu jika pemerintah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, maka pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

## **7. Suku Bunga**

Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (loanable funds). Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator dalam menentukan apakah seseorang akan melakukan investasi atau menabung. Pengertian lain tentang suku bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai "harga" dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi "pertukaran" antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti.

Dalam teori klasik menyatakan, bunga adalah harga dari loanable funds (dana investasi). Teori ini dikembangkan oleh kelompok ekonom klasik pada abad 19. Tingkat bunga adalah salah satu indikator dalam memutuskan apakah seseorang akan menabung atau melakukan investasi. Makin tinggi tingkat bunga, makin banyak dana yang ditawarkan. Dengan demikian, terdapat hubungan positif antara tingkat bunga dengan jumlah dana yang ditawarkan (Boediono, 1991). Pada prinsipnya, tingkat bunga adalah harga yang harus dibayarkan atas penggunaan dana untuk setiap unit waktu yang telah ditentukan melalui interaksi permintaan dan penawaran.

Permintaan akan *loanable fund* memiliki hubungan negatif dengan tingkat bunga. Dengan asumsi pendapatan dan faktor-faktor lainnya konstan, peningkatan tingkat bunga akan menurunkan permintaan terhadap dana peminjaman (*loanable fund*). Asumsi-asumsi tersebut berlaku dalam perekonomian dalam keadaan full employment, harga konstan, *supply of money* tetap, dan informasi sempurna.

Apabila dalam suatu perekonomian ada anggota masyarakat yang menerima pendapatan melebihi apa yang mereka perlukan untuk kebutuhan konsumsinya, maka kelebihan pendapatan akan dialokasikan atau digunakan untuk menabung. Penawaran akan *loanable funds* dibentuk atau diperoleh dari jumlah seluruh tabungan masyarakat pada periode tertentu. Di lain pihak dalam periode yang sama anggota masyarakat yang membutuhkan dana untuk operasi atau perluasan usahanya.

Menurut Marshall Principle : "bunga selaku harga yang harus dibayar untuk penggunaan modal di semua pasar, cenderung ke arah keseimbangan, sehingga modal seluruhnya di pasar itu menurut tingkat bunga sama dengan persediaannya yang tampil pada tingkat itu". Tingkat bunga ditetapkan pada titik dimana tabungan yang mewakili penawaran modal baru adalah sama dengan permintaannya.

Pengertian dasar dari teori tingkat suku bunga (secara makro) yaitu harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Bunga merupakan imbalan atas ketidaknyamanan karena melepas uang, dengan demikian bunga adalah harga kredit. Tingkat suku bunga berkaitan dengan peranan

waktu didalam kegiatankegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga muncul dari kegemaran untuk mempunyai uang sekarang.

Suku bunga adalah harga dana yang dapat dipinjamkan besarnya ditentukan oleh preferensi dan sumber pinjaman berbagai pelaku ekonomi di pasar. Suku bunga tidak hanya dipengaruhi perubahan preferensi para pelaku ekonomi dalam hal pinjaman dan pemberian pinjaman tetapi dipengaruhi perubahan daya beli uang, suku bunga pasar atau suku bunga yang berlaku berubah dari waktu ke waktu. Tidak jarang bank-bank menetapkan suku bunga terselubung, yaitu suku bunga simpanan yang diberikan lebih tinggi dari yang di informasikan secara resmi melalui media massa dengan harapan tingkat suku bunga yang dinaikkan akan menyebabkan jumlah uang yang beredar akan berkurang karena orang lebih senang menabung daripada memutarakan uangnya pada sektor-sektor produktif atau menyimpannya dalam bentuk kas dirumah.

Sebaliknya, jika tingkat suku bunga terlalu rendah, jumlah uang yang beredar di masyarakat akan bertambah karena orang akan lebih senang memutarakan uangnya pada sektor-sektor yang dinilai produktif. Suku bunga yang tinggi akan mendorong investor untuk menanamkan dananya di bank daripada menginvestasikannya pada sektor produksi atau industri yang memiliki tingkat risiko lebih besar. Sehingga dengan demikian, tingkat inflasi dapat dikendalikan melalui kebijakan tingkat suku bunga.

## **8. Investasi**

Investasi adalah penanaman modal atau dana dalam suatu aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari

investasi adalah untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan nilai aset atau modal. Investasi dapat dilakukan pada berbagai jenis aset seperti saham, obligasi, properti, dan lain-lain.

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang. Istilah investasi bisa berkaitan dengan berbagai macam aktivitas. Menginvestasikan dana pada sektor rill (tanah, emas, mesin atau bangunan) maupun *asset finansial* (deposito, saham atau obligasi), merupakan aktifitas yang umum di lakukan. Menurut Jogiyanto, investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan dalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu.

Sedangkan menurut Menurut Sukirno kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (2) penambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.

Pada dasarnya investasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi pada asset finansial dan investasi pada asset rill. Investasi pada asset finansial

dapat dibagi menjadi dua, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung.

- a) Investasi langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjual belikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjual belikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito.
- b) Investasi tidak langsung, yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi, seperti reksadana.

## **9. Nilai Tukar**

Nilai tukar adalah mata uang antara dua Negara yaitu harga dari mata uang yang digunakan oleh penduduk negara tersebut untuk saling melakukan perdagangan antara satu sama lain.

Aristoteles mendefinisikan nilai tukar (*value in exchange*) adalah sebagai kemampuan dari barang untuk dilakukan pertukaran dengan barang lainnya di pasar. Nilai tukar dalam manajemen keuangan didefinisikan sebagai suatu tingkatan dari mata uang yang akan dilakukan pertukaran dengan mata uang lainnya. Nilai tukar pada masa masyarakat sederhana dapat ditentukan dari banyak dan sedikitnya produktifitas atau kerja manusia dalam menghasilkan suatu barang atau jasa.

Menurut David K. Elteman, et al mendefinisikan nilai tukar sebagai sebuah harga dari suatu mata uang yang didasarkan menurut pada mata uang lainnya. Sedangkan menurut M. Faisal nilai tukar adalah harga dari satu

mata uang yang dinyatakan terhadap mata uang yang lainnya. Sederhananya nilai tukar dapat disebut sebagai tingkatan kondisi nilai dari satu mata uang terhadap mata uang lainnya.

Menurut Abimanyu (2004) menyatakan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga mata uang relative terhadap mata uang Negara lain, dan oleh karena nilai tukar ini mencakup dua mata uang maka titik keseimbangannya ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang. Dan Fabozzi dan Franco (1996:724) *an exchange rate is defined as the amount of one currency that can be exchange per unit of another currency, or the price of one currency in items of another currency.*

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai tukar mata uang adalah harga dari nilai mata uang suatu Negara terhadap Negara lain, serta dilakukan untuk transaksi tukar menukar yang dipergunakan dalam melakukan transaksi perdagangan, nilai tukar antara dua Negara yang mana nilai tukar tersebut ditentukan oleh penawaran dan permintaan dari kedua mata uang.

Mata uang suatu Negara dapat mengalami perubahan secara substansial Karena perubahan kondisi ekonomi, sosial politik. Perubahan tersebut bisa mengalami apresiasi jika mata uang domestik terhadap mata uang luar mengalami kenaikan , dan mengalami depresiasi ketika mata uang doemstik terhadap mata uang asing mengalami penurunan.

Penurunan atau kenaikan nilai mata uang juga dilakukan dan di intervensi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Bank Sentral untuk menyesuaikan kondisi sebenarnya yang ada di dalam pasar. Penurunan atau kenaikan yang di intervensi pemerintah dikenal dengan istilah Devaluasi

dan Revaluasi. Dikatakan Devaluasi adalah ketika penyesuaian ke bawah atau dengan kata lain penurunan nilai tukar yang dilakukan oleh Bank Sentral, dan sebaliknya dikatakan Revaluasi adalah ketika Bank Sentral melakukan penyesuaian ke atas atau dengan kata lain menaikkan nilai tukar.

## **10. Ekspor**

Dalam perdagangan internasional ekspor merupakan kegiatan penting, dimana ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri dengan menggunakan pembayaran, kualitas, kuantitas, dan syarat penjualan lain yang disetujui oleh eksportir dan importir. Agar mampu mengekspor, suatu negara harus berupaya menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar internasional (Sonia & Setiawina, 2016).

Secara langsung ekspor dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Namun kenaikan pendapatan nasional belum tentu menaikkan ekspor karena pendapatan nasional dapat mengalami kenaikan sebagai akibat dari kenaikan pengeluaran rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah dan penggantian barang impor dengan barang buatan dalam negeri (Benny, 2013).

Ekspor adalah upaya untuk melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada negara lain dengan peraturan pemerintah yang mengharapkan pembayaran dalam valuta asing (Pridayanti, 2013). Hasil dari penjualan barang ekspor yang berupa valuta asing disebut devisa. Hubungan antara ekspor dan cadangan devisa yaitu ketika melakukan kegiatan ekspor maka akan memperoleh sejumlah nilai uang dalam valuta asing yang disebut juga

devisa, dimana merupakan salah satu pemasukan negara (Sonia & Setiawina, 2016).

Ekspor merupakan pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Adapun faktor penting yang menentukan ekspor yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri (Benny, 2013). Ketika tingkat ekspor mengalami penurunan akan cadangan devisa juga akan mengalami penurunan dan sebaliknya jika tingkat ekspor mengalami peningkatan maka cadangan devisa yang dimiliki juga akan mengalami peningkatan (Sonia & Setiawina, 2016).

## **11. Hutang Luar Negeri**

Hutang adalah jumlah uang atau nilai lainnya yang dipinjam oleh satu pihak dari pihak lainnya, dengan kesepakatan untuk membayar kembali dalam jangka waktu tertentu dengan bunga atau imbalan lainnya. Hutang bisa diambil oleh individu, perusahaan, atau negara.

Hutang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Dalam pengambilan keputusan penggunaan hutang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari hutang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa.

Menurut FASB (*Financial Accounting Standart Board*) dalam Pithaloka (2009), hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi masa



mendatang yang timbul karena kewajiban sekarang suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lain dimasa mendatang sebagai akibat transaksi masa lalu. Menurut Munawir (2004) dalam Pithaloka (2009) hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.

Hutang terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a) Hutang Jangka Pendek

Hutang jangka pendek merupakan hutang yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu 1 tahun atau satu siklus operasi normal perusahaan dengan menggunakan sumber aktiva lancar atau dengan menimbulkan hutang jangka pendek yang baru. Siklus operasi periode waktu yang diperlukan antara akuisisi barang dan jasa yang terlibat dalam proses manufaktur serta realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan penagihan selanjutnya.

b) Hutang Jangka Panjang

Hutang jangka panjang merupakan pengorbanan manfaat yang “*probable*” dimasa yang akan datang, yang timbul dari kewajiban sekarang yang akan dilunasi dalam jangka waktu lebih dari siklus operasi atau satu tahun dan sumber-sumber untuk melunasi hutang jangka panjang adalah sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar.

## B. Penelitian Terdahulu

Peneliti melihat terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang serupa mengenai inflasi dan kebijakan fiskal. Dari penelitian yang ada peneliti melihat persamaan antara penelitian-penelitian yang ada sebelumnya, namun peneliti juga melihat adanya perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dalam hal variabel kredibilitas yang digunakan, metode maupun perbedaan dalam data-data yang digunakan. Berikut adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Judul	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Philipp C Rother, 2019 Fiscal Policy And Inflation Volatility	Regresi Linear Berganda	Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Rother ini relatif lemah mengenai dampak kebijakan fiskal terhadap inflasi, hal ini mungkin karena kekakuan yang lebih tinggi dari kebijakan fiskal relatif terhadap kebijakan moneter. Kebijakan fiskal biasanya hanya memutuskan dan diimplementasikan pada frekuensi tahunan, sehingga sulit untuk mendeteksi dampak fiskal pada tingkat inflasi tahunan.
2.	Aryo Kuncoro 2014 Does The Credible Fiscal Policy Support The Prices Stabilization”	Metode Analisis Simultan	Hasil dari penelitian yang dilakukan di Indonesia ini, terlihat pada Tabel pertamanya dimana terdapat nilai rata-rata kredibilitas aturan defisit (Z1) positif (0,0041), menunjukkan bahwa defisit yang sebenarnya lebih tinggi dari yang direncanakan. Sebaliknya, nilai rata-rata dari kredibilitas aturan utang (Z2) yang dilakukan dengan penyaringan model Hodrick Prescott yang menyiratkan bahwa utang yang sebenarnya hampir sama dengan nilai yang diproyeksikan. Mengingat hasil yang di atas, kita dapat mengatakan bahwa kebijakan aturan utang lebih kredibel daripada kebijakan aturan defisit.
3.	Ndari Surjaningsih, G. A. Diah Utari, Dan Budi Trisnanto 2012 Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini membahas dampak shock pada pengeluaran pemerintah terhadap penurunan inflasi yang dapat dijelaskan oleh dampak multiplier dari pengeluaran pemerintah untuk investasi (diantaranya infrastruktur) yang lebih besar

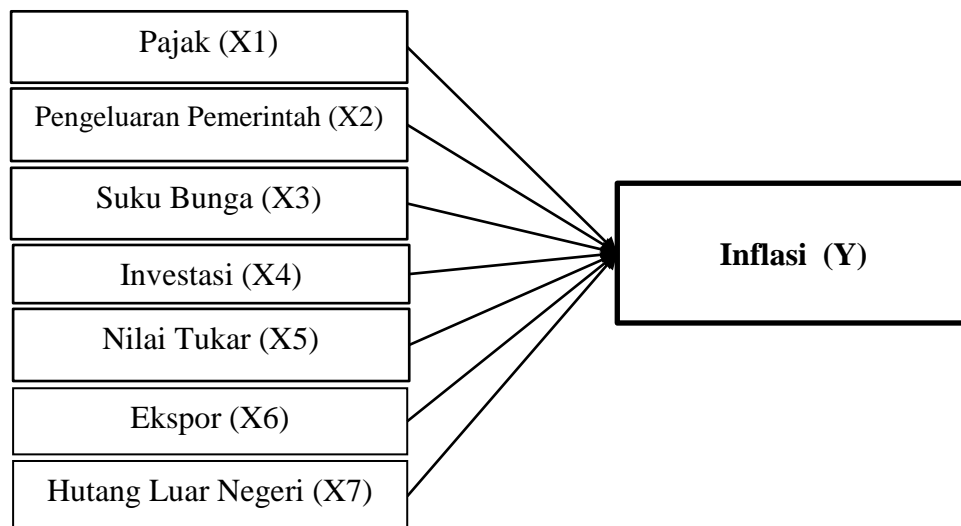
	Dan Inflasi”		dibandingkan pengeluaran rutin. Pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur diperkirakan dapat memperbaiki distribusi barang dan jasa sehingga berkontribusi terhadap penurunan inflasi.
4.	Rosyetti Dan Eriyati 2019 Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Inflasi Di Indonesia Tahun 1981-2010	Metode regresi OLS	Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa pembiayaan defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri menyebabkan inflasi. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa R <sup>2</sup> adalah sebesar 0.551459. Nilai ini memberikan indikasi bahwa perubahan Defisit Anggaran menentukan variasi perubahan sebesar 55.1 % persen terhadap Inflasi selama periode 1981-2010 sementara 44.9 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya.
5.	Stefan Niemann, Paul Pichler & Gerhard Sorge 2013 Public Debt, Discretionary Policy, And Inflation Persistence”	Metodologi Blanchard Dan Perotti	Hasil penelitian menunjukkan inflasi dalam model kebijakan fiskal dan kebijakan moneter yang optimal di bawah kebijaksanaan. Dalam model ini, ada pemerintahan yang bijak tunggal yang hanya dapat menggunakan instrumen pajak, tetapi bisa mengeluarkan nominal utang kontingen suatu negara. Kurangnya komitmen dan dengan tingginya utang publik yang nominal, masalah pemerintah adalah untuk manfaat <i>trade off</i> dan biaya inflasi. Di satu sisi, inflasi diantisipasi dalam model yang digunakan merupakan suatu hal menarik karena mengurangi nilai riil dari kewajiban. Di sisi lain, inflasi adalah mahal karena mengurangi kemungkinan konsumsi saat ini dengan meningkatkan biaya transaksi.
6.	Ahmad Jafari Samimi, Saman Ghaderi, Ramezan Hosseinzadeh, Younes Nademi 2017 Openness And Inflation: New Empirical Panel Data Evidence”	Regresi Data Panel	Hasil penelitian menunjukkan estimasi mengenai ukuran keterbukaan perdagangan menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara keterbukaan perdagangan dengan inflasi yang menentang hipotesis dari Romer (1993). Penelitian ini menggunakan dua proxy untuk langkah-langkah keterbukaan perdagangan: ukuran tradisional keterbukaan perdagangan dan ukuran lebih luas dari globalisasi ekonomi (indeks KOF). Di satu sisi, hasil estimasi untuk ukuran tradisional untuk dua kelompok negara dan dua periode menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara keterbukaan perdagangan dan inflasi.

7.	Heru Setiawan, 2019 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomi Indonesia Dengan Modelstructural Vector Autoregression (Svar)	Metodologi Blanchard Dan Perotti	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui kenaikan belanja pemerintah memberikan dampak positif terhadap PDB dan memicu terjadinya kenaikan inflasi serta tingkat suku bunga. <i>Shock</i> pada penerimaan pajak (kebijakan fiskal kontraktif) berdampak negatif terhadap output tetapi dampak tersebut berubah positif setelah satu tahun. <i>Shock</i> pada tingkat suku bunga diikuti dengan menurunnya tingkat inflasi sesuai dengan kaidah <i>Taylor Rule</i> . Secara umum, kebijakan fiskal di Indonesia belum mampu menstimulasi output dalam jangka pendek dengan cepat dan justru memberi tekanan pada kenaikan inflasi dan tingkat suku bunga nominal.
8.	Nurul Amin Dampak Kebijakan Fisikal Terhadap Output Dan Inflasi		Hasil penelitian menunjukkan Dalam jangka panjang pengenaan pajak berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sementara pengeluaran pemerintah tidak. Penyesuaian jangka pendek menunjukkan bahwa <i>shock</i> kenaikan pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap output sementara <i>shock</i> kenaikan pajak berdampak negatif. Lebih dominannya pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output dalam jangka pendek dibandingkan dengan pajak menunjukkan masih cukup efektifnya kebijakan ini untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam masa resesi. Sementara itu kenaikan pengeluaran pemerintah menyebabkan penurunan inflasi, sementara peningkatan pajak menyebabkan peningkatan inflasi. Studi ini juga menunjukkan tidak adanya diskresi kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah.
9.	Nur Farida, 2019 Kredibilitas Kebijakan Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Kemiskinan (Studi Empiris Pada Kabupaten Kota Di Pulau Jawa)	Metode regresi panel	Hasil analisis menunjukkan bahwa kredibilitas belanja pendidikan (X1) memiliki t hitung -3.387937 dengan p-value 0,0008, kredibilitas belanja kesehatan (X2) memperoleh nilai hitung 1.995166 dengan p-value 0.0465, kredibilitas belanja perlindungan sosial (X3) memiliki t hitung -3.646907 dengan p-value 0.0003, sedangkan pertumbuhan ekonomi (X4) memiliki t hitung -4.057634 dengan p-value 0.0001. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa kredibilitas

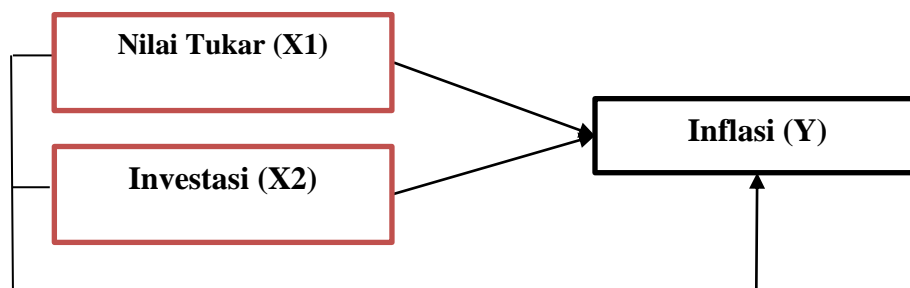
			belanja pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Jawa.
10.	Triwahyuni, 2021 Pengendalian Inflasi, Moneter, Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam	Metode Library Research	Hasil penelitian menunjukkan sebagai upaya untuk mengatasi inflasi, kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah perlu melakukan kebijakan ekonomi makro dalam kaitannya dengan pencapaian target inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian setiap negara perlu menjaga stabilitas ekonomi sesuai dengan tantangan yang dihadapinya

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)**



**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual Regresi Linear Berganda**

#### **D. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara, yang kebenarannya masih harus dibuktikan. Jawaban sementara ini merupakan masih titik tolak untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan perumusan masalah, maka hipotesis penelitian ini adalah :

1. Kredibilitas kebijakan fiskal (pajak) berdampak terhadap inflasi di Indonesi.
2. Kredibilitas fiskal (pengeluaran pemerintah) berdampak terhadap inflasi di Indonesia.
3. Suku bunga berdampak terhadap inflasi di Indonesia.
4. Investasi berdampak terhadap inflasi di Indonesia.
5. Nilai tukar berdampak terhadap inflasi di Indonesia.
6. Ekspor berdampak terhadap inflasi di Indonesia.
7. Hutang luar negeri berdampak terhadap inflasi di Indonesia.
8. Faktor pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi, nilai tukar, ekspor dan hutang luar negeri secara bersama-sama berdampak terhadap inflasi di Indonesia.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. (Rusiadi, 2015), penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dimana dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala.

#### B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Negara Indonesia, dengan rentang waktu mulai dari bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024.

**Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian**

No	Aktivitas	Bulan/Tahun				
		Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024
1	PengajuanJudul					
2	PenyusunanProposal					
3	Seminar Proposal					
4	P.AccProposal					
5	PengolahanData					
6	PenyusunanSkripsi					
7	BimbinganSkripsi					
8	MejaHijau					

#### C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk bagaimana suatu variabel diukur secara operasional di lapangan. Definisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi atau gabungan keduanya.

**Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi</b>	<b>Skala</b>
Pajak (X1)	Pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh individu, bisnis, atau entitas hukum lainnya kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik dan memenuhi kebutuhan negara.	Rasio
Pengeluaran Pemerintah (X2)	Pengeluaran pemerintah merujuk pada semua belanja yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.	Rasio
Suku Bunga (X3)	Tingkat suku bunga adalah harga dari penggunaan dana investasi (loanable funds).	Rasio
Investasi (X4)	Investasi, penanaman modal, atau pelaburan adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.	Rasio
Nilai Tukar (X5)	Nilai Tukar adalah sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.	Rasio
Ekspor (X6)	Ekspor adalah upaya untuk melakukan penjualan komoditi yang kita miliki kepada negara lain dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan pembayaran dalam valuta asing	Rasio
Hutang Luar Negeri (X7)	Hutang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda itu sendiri. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan hutang disebut kreditur.	Rasio
Inflasi (Y)	Inflasi merupakan suatu keadaan di mana perekonomian suatu negara terjadi kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu panjang.	Rasio

#### **D. Jenis Dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia. Data



tersebut berupa laporan atau data pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi, nilai tukar, ekspor, hutang dan inflasi.

## 2. Sumber Data

Sumber penelitian ini yaitu [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dan [www.Bank.Indonesia.go.id](http://www.Bank.Indonesia.go.id) periode data penelitian ini meliputi data dari tahun 2013 sampai 2022.

**Tabel 3.3 Sumber Data Penelitian**

No	Data	Sumber Data	Keterangan
1	Pajak	BPS	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
2	Pengeluaran Pemerintah	BPS	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
3	Suku Bunga	BPS	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
4	Investasi	BI	<a href="http://www.Bank.Indonesia.go.id">www.Bank.Indonesia.go.id</a>
5	Nilai Tukar	BI	<a href="http://www.Bank.Indonesia.go.id">www.Bank.Indonesia.go.id</a>
6	Ekspor	BPS	<a href="http://www.bps.go.id">www.bps.go.id</a>
7	Hutang Luar Negeri	BI	<a href="http://www.Bank.Indonesia.go.id">www.Bank.Indonesia.go.id</a>

## E. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui observasi dan wawancara langsung dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis, pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasi atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelian. Data yang diperoleh dari proses pengumpulan data merupakan data yang mentah.

Data tersebut tidak akan berguna apabila tidak dianalisis untuk memberi arti atau makna pada data tersebut guna dalam memecahkan masalah penelitian. Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sinetesa, menyusun

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain.

### 1. Analisis Faktor (*Confirmatory Factor Analysis / CFA*)

Analisis faktor adalah sebuah model, dimana tidak terdapat variabel bebas dan tergantung. Analisis faktor tidak mengklasifikasi variabel ke dalam kategori variabel bebas dan tergantung melainkan mencari hubungan interdependensi antar variabel agar dapat mengidentifikasi dimensi-dimensi atau faktor-faktor yang menyusunnya. Analisis faktor pertama kali dilakukan oleh Charles Spearman, dengan tujuan utama analisis faktor adalah menjelaskan hubungan diantara banyak variabel dalam bentuk beberapa faktor, faktor-faktor tersebut merupakan besaran acak (*random quantities*) yang dapat diamati atau diukur secara langsung.

Menurut Sarwono, (2012), kegunaan utama analisis faktor ialah melakukan pengurangan data atau dengan kata lain melakukan peringkasan sejumlah variabel yang akan menjadi kecil jumlahnya. Pengurangan dilakukan dengan melihat interdependensi beberapa variabel yang dapat dijadikan satu yang disebut faktor. Sehingga ditemukan variabel-variabel atau faktor-faktor yang dominan atau penting untuk dianalisis lebih lanjut.

Persamaan atau rumus analisis faktor adalah sebagai berikut:

$$X_i = A_{i1} F_1 + A_{i2} F_2 + A_{i3} F_3 + A_{i4} F_4 + \dots + V_i U_i$$

Dimana:

$F_i$  = Variabel terstandar ke-I

$A_{i1}$  = Koefisien regresi dari variabel ke I pada *common* faktor I

$V_i$  = Koefisien regresi terstandar dari variabel I pada faktor unik ke I

$F$  = *Common* faktor

$U_i$  = Variabel unik untuk variabel ke I

M = Jumlah *common* faktor

Secara jelas *common* faktor dapat diformulasikan sebagai berikut:  $F_i =$

$$W_{i1}X_1 + W_{i2}X_2 + W_{i3}X_3 + \dots + W_{ik}X_k$$

Dimana:

$F_i$  = Faktor ke I estimasi

$W_i$  = Bobot faktor atau skor koefisien faktor

X K = Jumlah variabel

Prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-asumsi yang terkait dengan metode statistik korelasi:

- a. Besar korelasi atau korelasi antar independen variabel harus cukup kuat.
- b. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap variabel yang lain.
- c. Pengujian sebuah matriks korelasi diukur dengan besaran *Bartlett Test of Sphericity* atau dengan *Measure Sampling Adequacy* (MSA).

Setelah sampel didapat dan uji asumsi terpenuhi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis faktor. Proses tersebut meliputi :

- a. Menguji variabel apa saja yang akan dianalisis.
- b. Menguji variabel-variabel yang telah ditentukan, menggunakan *Bartlett Test of Sphericity* dan MSA.

- c. Melakukan proses inti analisis faktor, yakni *factoring*, atau menurunkan satu atau lebih faktor dari variabel-variabel yang telah lolos pada uji variabel sebelumnya.
- d. Melakukan proses *factor rotation* atau rotasi terhadap faktor yang terbentuk. Tujuan rotasi untuk memperjelas variabel yang masuk ke dalam faktor tertentu.
- e. Interpretasi atau faktor yang telah terbentuk, yang dianggap bisa mewakili variabel-variabel anggota faktor tersebut.
- f. Validasi atas hasil faktor untuk mengetahui apakah faktor yang terbentuk telah valid.

Tahap pertama dalam analisis faktor adalah dengan menilai mana saja variabel yang dianggap layak untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya. Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan semua variabel yang ada dan kemudian pada variabel-variabel tersebut dikenakan sejumlah pengujian.

Logika pengujian adalah jika sebuah variabel memang mempunyai kecenderungan mengelompok dan membentuk sebuah faktor, variabel tersebut akan mempunyai korelasi yang cukup tinggi dengan variabel lain. Sebaliknya, variabel dengan korelasi yang lemah dengan variabel yang lain, akan cenderung tidak akan mengelompok dalam faktor tertentu.

Uji KMO dan *Bartlett Test*, memiliki beberapa hal yaitu angka KMO haruslah berada diatas 0,5 dan signifikan harus berada dibawah 0,05. sedangkan pada uji MSA angkanya haruslah berada pada 0 sampai 1, dengan kriteria:

- a.  $MSA = 1$ , Variabel dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh variabel yang lain.
- b.  $MSA > 0,5$ , Variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut.
- c.  $MSA < 0,5$ , Variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya.

Setelah satu atau lebih faktor terbentuk, dengan sebuah faktor berisi sejumlah variabel, mungkin saja sebuah faktor berisi sejumlah variabel yang split ditentukan akan masuk ke dalam faktor mana, maka proses selanjutnya adalah dengan melakukan proses rotasi yang akan memperjelas kedudukan sebuah variabel didalam sebuah faktor. Menurut (Rusiadi, 2015) setelah diketahui faktor mana saja yang mewakili sebuah variabel dependent maka analisa selanjutnya dilakukan dengan regresi berganda. (Rusiadi, 2015)

## 2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Untuk mendapatkan nilai pemeriksa yang tidak bias dan efisien (*Best Linear Unbias Estimator/BLUE*) dari suatu persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Least Squares*), perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan dengan jalan memenuhi persyaratan asumsi klasik yang meliputi :

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian asumsi residual yang berdistribusi normal. Asumsi ini harus terpenuhi untuk model regresi linier yang baik.

Uji normalitas dilakukan pada nilai residual model. Asumsi normalitas dapat diperiksa dengan pemeriksaan *output* normal P-P plot. Asumsi normalitas terpenuhi ketika penyebaran titik-titik *output* plot mengikuti garis diagonal plot. (Rusiadi, 2015 )

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng. Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut tidak melenceng kekiri atau melenceng kekanan.

Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Menurut Ghozali, ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistic, (Imam Ghozali, 2011).

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan yaitu model yang terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas,(Rusiadi, 2015 ) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

### c. Uji Multikolinieritas

Menurut Santoso, uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Dalam penelitian ini uji multikolinieritas menggunakan *Tolerance* dan VIF (*Variances Inflation Factor*).

- 1) Jika nilai *tolerance* < 0,10 dan VIF > 10, maka terdapat korelasi diantara salah satu variabel independen lainnya atau terjadi multikolinieritas.
- 2) Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10, maka tidak terjadi korelasi diantara salah satu variabel independen lainnya atau tidak terjadi multikolinieritas, (Rusiadi, 2015 ).

### 3. Uji Hipotesis (Kesesuaian)

#### a. Uji t (parsial)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan uji t, yaitu menguji pengaruh parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, (Rusiadi, 2015 ). Untuk menguji signifikan pengaruh variabel menggunakan uji t dengan rumus:

$$t = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$$

Dengan taraf signifikan 5 % uji dua pihak dan  $dk = n-2$ , dan kriteria pengujian adalah :

$P \text{ value (sig)} < 0,05 = H_0$  ditolak

$P \text{ value (sig)} > 0,05 = H_0$  diterima

Dengan ketentuan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = 0$ , Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Suku Bunga, Investasi, Nilai Tukar, Ekspor dan Hutang berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia.

$H_a \neq 0$ , Pajak, Pengeluaran Pemerintah, Suku Bunga, Investasi, Nilai Tukar, Ekspor dan Hutang berpengaruh terhadap Inflasi di Indonesia..

#### **b. Uji F (Serempak/simultan)**

Uji F-statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Menurut Sugiyono (2012:257), nilai  $F_{hitung}$  dapat diperoleh dengan rumus:

$$F - \text{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

$R^2 =$  Koefisien Determinasi

$k =$  Jumlah variabel independen



$n$  = Jumlah sampel

Dengan kriteria pengujian pada tingkat kepercayaan  $(1-\alpha)$  100% sebagai berikut:

$H_0$  diterima, jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$

$H_0$  ditolak, jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$

#### 4. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas, (Rusiadi, 2015 ). Koefisien determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap variabel terikatnya dalam satuan persentase.

Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Cara menghitung koefisien determinasi yaitu :

$$D = (r_{xy})^2 \cdot 100\%$$

Dimana :

$D$  = Koefisien Determinan

$R_{xy}$  = Koefisien Korelasi *Product Momen*

## 5. Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar beberapa variabel (Rusiadi, 2015), dengan bentuk persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \varepsilon$$

Dimana:

$Y$  = Inflasi

$a$  = Harga  $Y$  bila  $X_1$  dan  $X_2 = 0$  (harga konstan)

$\beta$  = Koefisien regresi

$X_1$  = Pajak

$X_2$  = Pengeluaran Pemerintah

$X_3$  = Suku Bunga

$X_4$  = Investasi

$X_5$  = Nilai Tukar

$X_6$  = Ekspor

$X_7$  = Hutang.

$\varepsilon$  = Error Term

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 baik pulau yang bernama maupun yang belum bernama. Luas wilayah yang di miliki Indonesia seluruhnya adalah 5,2 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 1,9 juta km<sup>2</sup> darataan dan 3,3 juta km<sup>2</sup> lautan. Adapun lima pulau besar yang di miliki oleh Indonesia yakni meliputi Sumatera dengan luas wilayah 480.793,28 km<sup>2</sup> , Jawa dengan luas wilayah 129.438,28 km<sup>2</sup> , Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas wilayah 544.150,07 km<sup>2</sup> , Sulawesi dengan luas wilayah 188.522,36 km<sup>2</sup> , dan Papua dengan luas wilayah 416.060,32 km<sup>2</sup> . Secara geografis, Indonesia berada di antara 6° LU-11° LS dan 95° BT-141° BT. Dan jika dibentangkan, wilayah Indonesia berada di sepanjang 3.977 mill antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Posisi Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera yang tentunya ini memberi pengaruh besar terhadap kebudayaan, sosial, dan ekonomi masyarakatnya.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik atau bisa disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan batasbatas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Negara Filipina, Malaysia, Singapura, India dan Samudera Pasifik.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Negara Australia, Timor Leste dan Samudera Hindia.

3. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.
4. Sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini dan Samudera Pasifik.

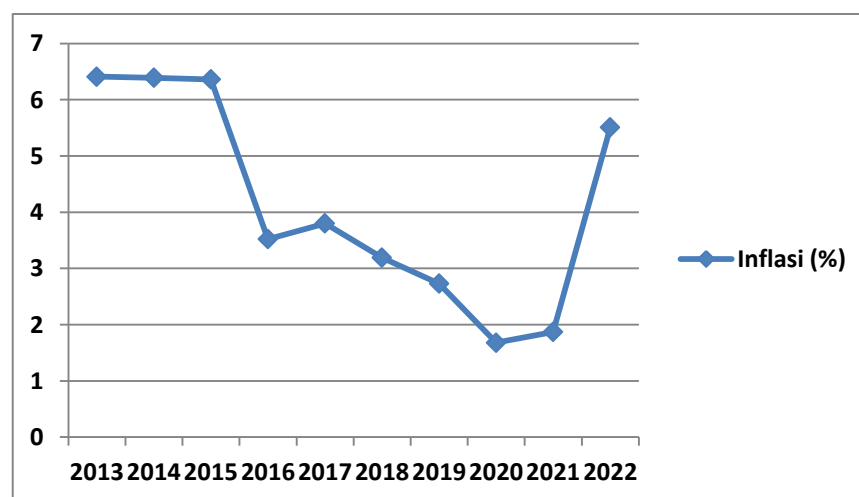
Bentuk pemerintahan Negara Indonesia adalah Republik dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Pada tiap-tiap provinsi dipimpin oleh seorang gubernur dan mewakili DPRD Provinsi. Dan kabupaten atau kota dipimpin oleh bupati atau walikota dan DPRD Kabupaten atau DPRD Kota. Negara Indonesia juga menghormati dan mengakui satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa sebagaimana diatur dalam undang-undang. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari 34 provinsi (setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Utara pada 2012 silam). Pada tahun 2013, Indonesia terdiri dari 413 Kabupaten dan 98 kota yang di dalamnya terdapat 6.982 kecamatan. Sementara satuan administrasi terkecil adalah desa dengan jumlah sebanyak 80.714 desa.

## **B. Perkembangan Inflasi Indonesia**

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi.

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil

memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi di negara tetangga menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai Rupiah. Keempat, kestabilan harga memiliki peran penting dalam mendukung upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.



**Gambar 4.1 Perkembangan Inflasi Negara Indonesia**

Data diatas terlihat tingkat inflasi menurun dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, namun pada tahun 2021-2022 terus meningkat drastis mencapai angka 5,5%. Yang mengakibatkan perekonomian berada pada masalah yang serius mulai dari menurunnya daya beli masyarakat, meningkatnya biaya pinjaman, dan

penurunan investasi. Oleh karena itu, pemerintah biasanya berusaha untuk mengendalikan inflasi melalui berbagai kebijakan ekonomi, seperti menaikkan suku bunga, mengurangi pengeluaran pemerintah, dan mengurangi jumlah uang yang beredar di pasar.

Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (*demand management*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespons kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Sementara itu, inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran ataupun yang bersifat kejutan (*shocks*) seperti kenaikan harga minyak dunia dan adanya gangguan panen atau banjir. Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor penawaran dan kejutan diwakili oleh kelompok *Volatile Food* dan *Administered Prices* yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK.

## **C. Hasil Penelitian**

### **1. Hasil Analisis Data *Confirmatory Factor Analysis* (CFA)**

Untuk menganalisis data hasil penelitian maka peneliti melakukan dan menerapkan teknik analisis deskriptif yaitu dengan menganalisis serta pengelompokkan, kemudian diinterpretasikan sehingga akan diperoleh gambaran yang sebenarnya tentang masalah yang diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis faktor yang bertujuan untuk menemukan suatu cara

meringkas informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi satu set dimensi baru atau variabel (faktor).

Hal pertama yang harus dilakukan dalam analisis faktor adalah menilai variabel mana saja yang layak untuk dimasukkan kedalam analisis selanjutnya. Analisis faktor menghendaki bahwa matrik data harus memiliki korelasi yang cukup agar dapat dilakukan analisis faktor, untuk itu dilakukan pengujian sebagai berikut:

- a) *Barlett's test of Sphericity* yang dipakai untuk menguji bahwa variabel-variabel dalam sampel berkorelasi.
- b) Uji *Kaiser-Meyer-Olkin* (KMO) untuk mengetahui kecukupan sampel atau pengukuran kelayakan sampel. Analisis faktor dianggap layak jika nilai KMO  $> 0,5$ .
- c) Uji *Measure of Sampling Adequacy* (MSA) yang digunakan untuk mengukur derajat korelasi antar variabel dengan kriteria MSA  $> 0,5$

Adapun hasil dari pengujian *Barlett's test of Sphericity* dan *Kaiser- Meyer-Olkin* (KMO) dengan bantuan *software* SPSS 23 terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1 KMO and Bartlett's Test**

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.540
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	64.277
	df	28
	Sig.	.000

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Tabel diatas menunjukkan nilai yang diperoleh dari uji *Barlett's test of Sphericity* adalah sebesar 64.277 dengan signifikansi 0,000, hal ini berarti bahwa antar variabel terjadi korelasi (signifikan  $< 0,050$ ). Hasil uji *Kaiser-*

*Meyer-Olkin* (KMO) diperoleh nilai 0,540 dimana angka tersebut sudah diatas 0,5. Dengan demikian variabel-variabel dalam penelitian ini dapat diproses lebih lanjut.

Langkah berikutnya adalah pengujian *Measure of Sampling Adequacy* (MSA), dimana setiap variabel dianalisis untuk mengetahui variabel mana yang dapat diproses lebih lanjut dan mana yang harus dikeluarkan. Untuk dapat diproses lebih lanjut setiap variabel harus memiliki nilai  $MSA > 0,5$ . Nilai MSA tersebut terdapat dalam tabel *Anti-Image Matrice* pada bagian *Anti-Image Correlation* yaitu angka korelasi yang bertanda "a" dengan arah diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Adapun hasil uji MSA untuk variabel penelitian ini terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.2 Anti-image Matrices**

		Pajak	Pengeluaran Pemerintah	Suku Bunga	Investasi	Nilai Tukar	Ekspor	Hutang Luar Negeri	Inflasi
Anti-image Covariance	Pajak	.096	-.016	-.031	.014	.003	-.058	-.014	.001
	Pengeluaran Pemerintah	-.016	.113	.048	.103	-.033	.071	.021	-.026
	Suku Bunga	-.031	.048	.040	.032	-.017	.050	.015	-.021
	Investasi	.014	.103	.032	.137	-.028	.052	.011	-.038
	Nilai Tukar	.003	-.033	-.017	-.028	.024	-.023	-.017	-.011
	Ekspor	-.058	.071	.050	.052	-.023	.090	.019	-.026
	Hutang Luar Negeri	-.014	.021	.015	.011	-.017	.019	.014	.013
	Inflasi	.001	-.026	-.021	-.038	-.011	-.026	.013	.069
Anti-image Correlation	Pajak	.735 <sup>a</sup>	-.159	-.496	.125	.056	-.625	-.368	.007
	Pengeluaran Pemerintah	-.159	.537 <sup>a</sup>	.713	.826	-.642	.705	.517	-.297
	Suku Bunga	-.496	.713	.515 <sup>a</sup>	.426	-.562	.836	.613	-.406
	Investasi	.125	.826	.426	.699 <sup>a</sup>	-.482	.467	.258	-.396
	Nilai Tukar	.056	-.642	-.562	-.482	.536 <sup>a</sup>	-.505	-.907	-.269
	Ekspor	-.625	.705	.836	.467	-.505	.738 <sup>a</sup>	.527	-.324
	Hutang Luar Negeri	-.368	.517	.613	.258	-.907	.527	.596 <sup>a</sup>	.402
	Inflasi	.007	-.297	-.406	-.396	-.269	-.324	.402	.744 <sup>a</sup>

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Dari tabel diatas diketahui bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini memiliki nilai  $MSA > 0,5$  sehingga variabel dapat dianalisis secara keseluruhan lebih lanjut.



Selanjutnya untuk melihat variabel mana yang memiliki nilai *communalities correlation* di atas atau di bawah 0,5 atau diatas 50% dapat dilihat pada tabel *comunalities* berikut ini :

**Tabel 4.3 Communalities**

	Initial	Extraction
Pajak	1.000	.869
Pengeluaran Pemerintah	1.000	.709
Suku Bunga	1.000	.838
Investasi	1.000	.792
Nilai Tukar	1.000	.874
Ekspor	1.000	.752
Hutang Luar Negeri	1.000	.910
Inflasi	1.000	.757

Extraction Method: Principal Component Analysis.

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Hasil analisis data menunjukkan semakin besar *communalities* sebuah variabel, berarti semakin erat hubungannya dengan faktor yang terbentuk. Tabel *communalities* menunjukkan hasil *extraction* secara individu terdapat delapan variabel yang memiliki kontribusi yang melebihi 0,5 atau 50% yaitu pajak, pengeluaran pemerintah, suku bunga, investasi, nilai tukar, ekspor dan hutang luar negeri dan inflasi. Namun kelayakan selanjutnya harus diujidengan *variance Explained*.

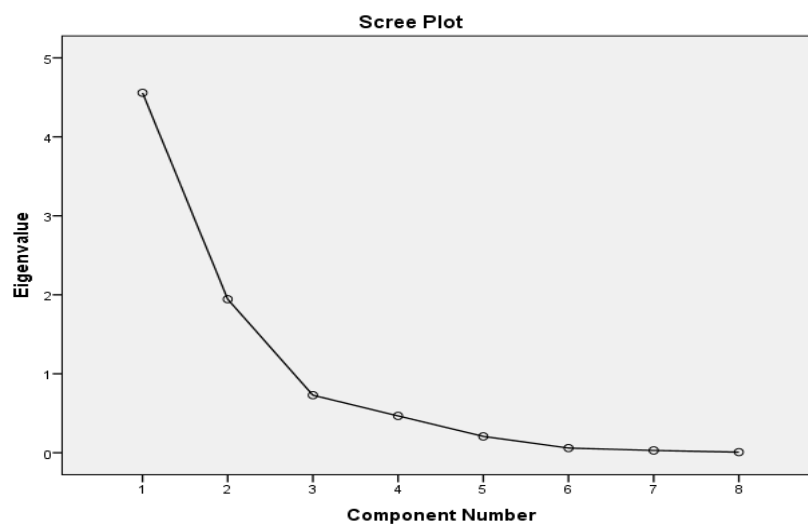
**Tabel 4.4 Total Variance Explained**

Component	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulative %
1	1.558	56.973	56.973	4.558	56.973	56.973	3.502	43.773	43.773
2	1.944	24.295	81.268	1.944	24.295	81.268	3.000	37.495	81.268
3	.729	9.108	90.376						
4	.467	5.833	96.208						
5	.207	2.586	98.795						
6	.059	.742	99.537						
7	.029	.366	99.903						
8	.008	.097	100.000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Berdasarkan hasil total *variance explained* pada tabel *initial Eigenvalues*, diketahui bahwa hanya ada 4 komponen variabel yang menjadi faktor mempengaruhi pendapatan pedagang. *Eigenvalues* menunjukkan kepentingan relatif masing-masing faktor dalam menghitung varians ke tujuh variabel yang dianalisis. Dari tabel diatas terlihat bahwa hanya ada 2 faktor yang terbentuk. Karena ke 2 faktor memiliki nilai total angka *eigenvalues* diatas 1 yakni sebesar 1.558 untuk faktor 1, dan sebesar 1.944 untuk faktor 2. Sehingga proses *factoring* berhenti pada 4 faktor saja yang akan ikut dalam analisis selanjutnya.



**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

**Gambar 4.2 Scree plot Component Number**

Grafik *scree plot* menunjukkan bahwa dari satu ke dua faktor (garis dari sumbu *Component Number* = 1 ke 2), arah grafik menurun. Kemudian dari angka 3 ke 4, garis masih menurun. Sedangkan dari angka 5 ke angka 6 sudah dibawah angka 1 dari sumbu Y (*Eigenvalues*). Hal ini menunjukkan bahwa empat faktor adalah paling bagus untuk meringkas delapan variabel tersebut.

Tabel 4.5 Component Matrix<sup>a</sup>

	Component	
	1	2
Pajak	.761	.539
Pengeluaran Pemerintah	.520	-.662
Suku Bunga	-.859	.315
Investasi	-.587	.668
Nilai Tukar	.804	.477
Ekspor	.714	.492
Hutang Luar Negeri	.936	.187
Inflasi	-.770	.405

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 2 components extracted.

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Setelah diketahui bahwa tiga faktor adalah jumlah yang paling optimal, maka dapat dilihat dalam tabel *Component Matrix* menunjukkan distribusi dari delapan variabel tersebut pada empat faktor yang terbentuk. Sedangkan angka-angka yang ada pada tabel tersebut adalah *factor loadings*, yang menunjukkan besar korelasi antar suatu variabel dengan faktor 1, faktor 2, faktor 3 dan faktor 4. Proses penentuan variabel mana akan masuk ke faktor yang mana, dilakukan dengan melakukan perbandingan besar korelasi pada setiap baris.

Pada tabel *component matrix* menunjukkan korelasi diatas 0,5. pada faktor 1 yaitu :

- a) Nilai Tukar memiliki *factor loading* sebesar 0,804
- b) Eksport memiliki *factor loading* sebesar 0,714
- c) Hutang Luar Negeri memiliki *factor loading* sebesar 0,936

Pada faktor 2 yaitu variabel yang menunjukkan korelasi diatas 0,5 yaitu:

- a) Pajak memiliki *factor loading* sebesar 0,539
- b) Investasi memiliki *factor loading* sebesar 0,668

Pada awalnya, ekstraksi tersebut masih sulit untuk menentukan item dominan yang termasuk dalam faktor karena nilai korelasi yang hampir sama dari beberapa item. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dilakukan rotasi yang mampu menjelaskan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata, dibawah ini merupakan tabel yang menunjukkan hasil rotasi untuk memperjelas posisis sebuah variabel pada sebuah faktor.

**Tabel 4.6 Rotated Component Matrix<sup>a</sup>**

	Component	
	1	2
Pajak	.920	-.067
Pengeluaran Pemerintah	-.019	-.842
Suku Bunga	-.463	.790
Investasi	-.029	.889
Nilai Tukar	.924	-.143
Ekspor	.864	-.074
Hutang Luar Negeri	.841	-.450
Inflasi	-.337	.802

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 3 iterations.

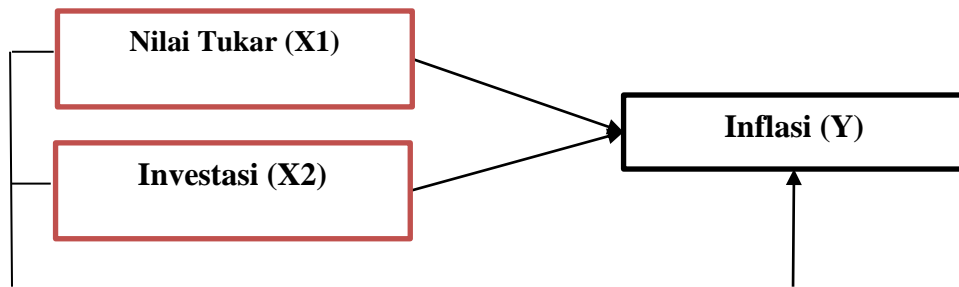
**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

*Component Matrix* hasil proses rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas dan nyata. Penentuan input variabel ke faktor tertentu mengikut pada besar korelasi antara variabel dengan faktor, yaitu kepada korelasi yang besar.

Berdasarkan hasil nilai *component matrix* diketahui bahwa dari delapan faktor, maka yang layak untuk mempengaruhi pendapatan usaha tani adalah tiga faktor yang berasal dari :

- a. Komponen 1 terbesar : Nilai Tukar
- b. Komponen 2 terbesar : Investasi

Sehingga terbentuklah suatu dimensi baru regresi linear berganda dengan kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 4.3 Kerangka Konseptual Regresi Linear Berganda**

Selanjutnya model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini di rumuskan :

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + e$$

Dimana :

Y = Inflasi

X1 = Nilai Tukar

X2 = Investasi

e = Error term

Model regresi linear berganda dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yaitu:

- a. Uji Normalitas
- b. Uji Multikolinearitas
- c. Uji Heteroskedastisitas.

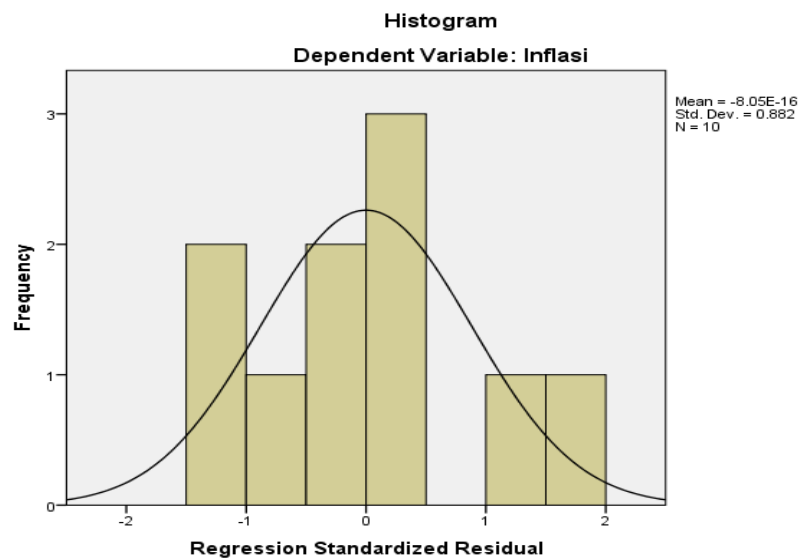
## 2. Hasil Analisis Data Regresi Linear Berganda

### a) Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dari penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa alat uji regresi linier berganda layak atau tidak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka alat uji statistik regresi linier berganda dapat digunakan.

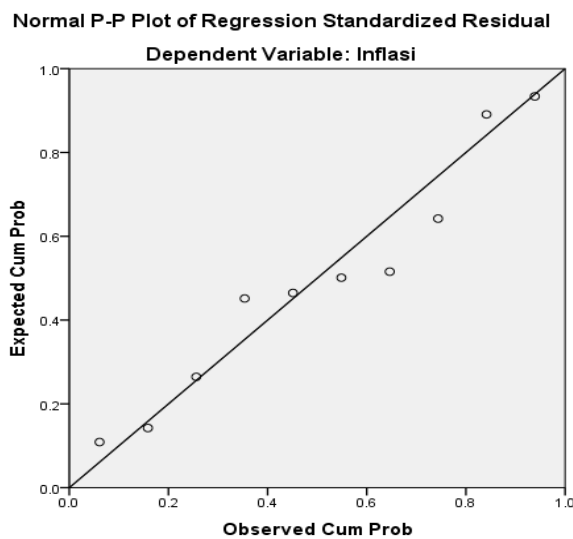
#### 1) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik distribusi data normal atau mendekati normal.



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0

Gambar 4.4 Histogram Uji Normalitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0

**Gambar 4.5 Normal P-P Plot Regression Standarized Residual**

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa data dalam penetian ini telah berdistribusi normal yaitu dimana dapat dilihat dari gambar histogram yang memiliki kecembungan seimbang ditengah dan juga dilihat dari gambar normal pp plot terlihat bahwa titik-titik berada diantara garis diagonal maka dapat di simpulkan bahwa sebaran data berdistribusi normal.

## 2) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent*). Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Apabila nilai *tolerance value*  $> 0,10$  atau  $VIF < 5$  maka disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas dari hasil laporan keuangan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.578	8.166		4.683	.000		
Nilai Tukar	0.573	2.519	.309	2.105	.000	.987	1.013
Investasi	0.425	2.024	.570	2.038	.001	.987	1.013

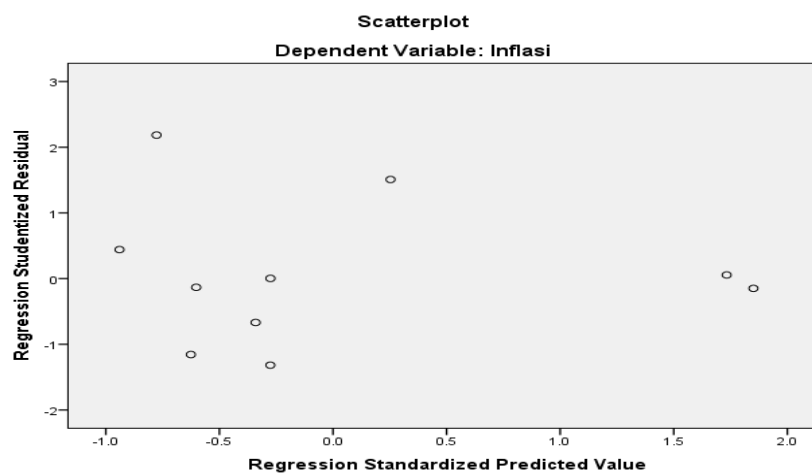
a. Dependent Variable: Inflasi

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 5 antara lain adalah nilai tukar 1,013 < 5, investasi 1,013 < 5 dan nilai *Tolerance* nilai tukar 0,987 > 0,10, investasi 0,987 > 0,10, sehingga terbebas dari multikolinieritas.

### 3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas.



**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

**Gambar 4.6 scatterplot Uji Heteroskedastisitas**



Berdasarkan gambar di atas, gambar *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas juga menunjukkan bahwa sebaran data ada di sekitar titik nol. Dari hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan perkataan lain variabel-variabel yang akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

### b) Regresi Linear Berganda

**Tabel 4.8 Regresi Linear Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.578	8.166		4.683	.000		
Nilai Tukar	0.573	2.519	.309	2.105	.000	.987	1.013
Investasi	0.425	2.024	.570	2.038	.001	.987	1.013

a. Dependent Variable: Inflasi

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Berdasarkan tabel diatas tersebut diperoleh regresi linier berganda sebagai berikut  $Y = 5.578 + 0,573 X_1 + 0,425 X_2 + \epsilon$ . Interpretasi dari persamaan regresi linier berganda adalah:

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel bebas dianggap tetap maka inflasi adalah sebesar 5.578.
- 2) Jika nilai tukar terjadi penurunan maka inflasi akan menurun sebesar 0,573 satu satuan nilai.

- 3) Jika investasi terjadi peningkatan, maka inflasi akan menurun sebesar 0,425 satu satuan nilai.

c) *Test Goodness Of fit*

1. Uji –t (Uji Hipotesis Parsial)

**Tabel 4.9 Uji –t (Uji Hipotesis Parsial) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.578	8.166		4.683	.000		
Nilai Tukar	0.573	2.519	.309	2.105	.000	.987	1.013
Investasi	0.425	2.024	.570	2.038	.001	.987	1.013

a. Dependent Variable: Inflasi

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Berdasarkan tabel 4.37 diatas dapat dilihat bahwa:

- Nilai  $t_{hitung}$  nilai tukar sebesar  $2,105 > 1,652$  kemudian nilai sig  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya nilai tukar signifikan dengan inflasi.
- Nilai  $t_{hitung}$  investasi sebesar  $2.038 > 1,652$  kemudian nilai sig  $0,001 < 0,05$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya investasi signifikan dengan inflasi.

2. Uji – F (Uji Hipotesis Simultan)

Uji F (uji serempak) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara serempak. Cara yang digunakan adalah dengan melihat *level of significant* ( $=0,05$ ). Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

**Tabel 4.10 Uji – F (Uji Hipotesis Simultan) ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	14.544	2	7.272	12.982	.006 <sup>b</sup>
Residual	17.072	7	2.439		
Total	31.615	9			

a. Dependent Variable: Inflasi

b. Predictors: (Constant), Investasi, Nilai Tukar

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji anova dengan analisis F (Fisher) diketahui nilai F hitung sebesar  $12.982 > F$  tabel 2,42 sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak dan artinya nilai tukar dan investasi secara bersama-sama signifikan dengan inflasi.

### 3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Analisis koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase besarnya variasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

**Tabel 4.11 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.678 <sup>a</sup>	.460	.306	1.56166	1.642

a. Predictors: (Constant), Investasi, Nilai Tukar

b. Dependent Variable: Inflasi

**Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 23.0**

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka *adjusted R Square* 0,306 yang dapat disebut koefisien determinasi yang dalam hal ini berarti 30,6% inflasi di Indoensia dapat diperoleh dan dijelaskan oleh nilai tukar dan investasi, sedangkan sisanya 69,4% dijelaskan oleh faktor lain atau variabel diluar model yang tidak diteliti.

## D. Pembahasan

Dari hasil pengujian terlihat bahwa semua variabel bebas mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat (inflasi). Hasil rinci analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Analisis Hasil *Confirmatory Faktor Analisis* (CFA)

Hasil analisa pada *Confirmatory Faktor Analisis* (CFA) menunjukkan bahwa dari tabel *variance Explained* terlihat bahwa hanya ada 2 faktor yang terbentuk. Faktor yang berasal dari komponen 1 terbesar yaitu nilai tukar, dan komponen 2 terbesar yaitu investasi.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Heru Setiawan 2018), menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi adalah suku Bunga, pajak dan PDB. Pada penelitian (Ravena M. 2023) Hasil penelitian menunjukkan Kurs berpengaruh secara signifikan terhadap Inflasi, dan Investasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Inflasi. Moh Faizi (2020) menambahkan hasil penelitian didapati bahwa dalam jangka pendek tidak terdapat pengaruh kurs terhadap inflasi, sebaliknya inflasi berpengaruh terhadap kurs. Dalam jangka panjang kedua variabel kurs dan inflasi terdapat kausalitas. Penelitian yang dilakukan (Istiqomah 2011) hasil penelitian menunjukkan inflasi, penanaman modal asing, dan dummy krisis berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Sedangkan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia. Dan ditambah hasil penelitian (Risa T. 2020) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa secara

langsung, namun secara tidak langsung tidak berpengaruh melalui ekspor. Investasi secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap cadangan devisa melalui ekspor. Nilai tukar riil tidak berpengaruh terhadap cadangan devisa secara langsung, namun secara tidak langsung nilai tukar riil berpengaruh negatif terhadap cadangan devisa melalui ekspor.

Dalam prakteknya transmisi kebijakan moneter masing-masing negara berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang didasarkan pada perbedaan struktur perekonomian, perkembangan pasar keuangan, dan sistem nilai tukar yang dianut. Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia sangat dipengaruhi perubahan struktural dan kebijakan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebelum dan sesudah krisis ekonomi tahun 1997 (Warjiyo dan Agung, 2002). Pada periode sebelum krisis, penggunaan jalur suku bunga bekerja cukup baik dalam mentransmisikan pengaruh kebijakan moneter pada perubahan suku bunga simpanan dan pinjaman. Hal ini terjadi karena perekonomian Indonesia dalam periode tersebut mengalami peningkatan aliran modal dari luar negeri yang sangat tinggi. Sementara itu, jalur nilai tukar tidak begitu kuat perannya mengingat pada periode sebelum krisis Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali.

Dalam transmisi kebijakan moneter, nilai tukar merupakan salah satu jalur yang dapat menjelaskan perubahan tingkat harga pada suatu periode selain pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Pergerakan nilai tukar dapat mempengaruhi penawaran dan permintaan agregat, yang

selanjutnya berdampak pada output dan harga. Besar kecilnya pengaruh pergerakan nilai tukar terhadap tingkat harga sangat ditentukan oleh sistem nilai tukar yang dianut suatu negara. Dalam sistem nilai tukar mengambang, kebijakan moneter ekspansif oleh bank sentral akan mendorong depresiasi mata uang domestik dan meningkatkan harga barang impor, yang selanjutnya akan mendorong kenaikan harga barang domestik, walaupun tidak terdapat ekspansi di sisi permintaan agregat. Hal ini yang disebut sebagai dampak langsung dari pergerakan nilai tukar (*direct pass through*) dan jika pengaruh perubahan nilai tukar melalui perubahan permintaan agregat disebut sebagai dampak tidak langsung (*indirect pass-through*). Sementara itu, dalam sistem nilai tukar mengambang terkendali, pengaruh kebijakan moneter terhadap perkembangan output riil dan inflasi menjadi semakin lemah, terutama apabila terdapat substitusi yang tidak sempurna antara aset domestik dan aset luar negeri.

**a) Nilai Tukar Berpengaruh Signifikan Terhadap Inflasi.**

Berdasarkan hasil pengelolaan *Confirmatory Faktor Analisis* (CFA) pada output rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan komponen 1 terbesar adalah nilai tukar sebesar 0.924, layak mempengaruhi inflasi di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan nilai tukar berpengaruh **signifikan** terhadap inflasi di Indonesia.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Azam Achsani dkk., (2010), yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang kuat di Negara Amerika dan Eropa, sementara di Negara-negara

Asia terdapat kausalitas satu arah dimana kurs berpengaruh terhadap inflasi. Pengamatan yang dilakukan dengan menganalisis data kurs dan data inflasi bulanan di Indonesia untuk tahun 2010-2019 mendapati hasil yang berbeda antara hubungan kedua variabel dalam jangka pendek dan hubungan variabel dalam jangka panjang. Dari hasil uji kointegrasi, dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang kurs mampu mempengaruhi inflasi serta begitu pula sebaliknya, inflasi dalam jangka panjang juga mampu mempengaruhi kurs.

Berdasarkan *Teori Purchasing Power Parity* (PPP) atau paritas daya beli dikemukakan oleh Gustav Cassel pada tahun (1920) yang menyatakan bahwa perbandingan nilai satu mata uang dengan mata uang lain ditentukan oleh tenaga beli uang tersebut di masing masing negara. Dasar teorinya adalah perbandingan nilai tukar menggunakan tingkat harga di masing-masing Negara, dapat diketahui bahwa tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan melemahnya nilai tukar mata uang. Dengan demikian hasil menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

Dekat hubungan antara nilai tukar dan inflasi membuat merosotnya rupiah akan menyebabkan inflasi melesat seperti pada tahun 1998. Sementara inflasi yang tinggi terhadap Negara-negara lain akan membuat kurs rupiah melemah, sesuai dengan teori paritas daya beli, yang menyebabkan untuk menyetarakan harga sekumpulan barang yang identik di berbagai negara. Teori paritas daya beli adalah mengharuskan barang-barang tersebut memiliki harga yang setara pada

negara satu dan lainnya. Dasar yang mendasari konsep paritas harga adalah hukum satu harga.

Dengan demikian inflasi juga mempengaruhi banyak sendi kehidupan mulai dari bunga bebas resiko, yang pada waktunya akan menentukan suku bunga tabungan, kredit, obligasi, diskonto dan yield. Sehingga bunga diskonto dan yield baru membuat valuasi semua asset berubah termasuk saham.

Pada penelitian (Ravena M. 2023) Hasil penelitian menunjukkan Kurs berpengaruh secara signifikan terhadap Inflasi, dan Investasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Inflasi. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan yang sedikit berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan Purba (2018), dimana antar dua variabel terdapat kausalitas. sekaligus hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan Winanda & Seftarita (2016), yang menyebutkan bahwa tidak terdapat kausalitas antara kedua variabel. Hasil ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan Azam Achsani dkk., (2010), yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang kuat di Negara amerika dan erpa, sementara di Negara-negara Asia terdapat kausalitas satu arah dimana kurs berpengaruh terhadap inflasi. Pengamatan yang dilakukan dengan menganalisis data kurs dan data inflasi bulanan di Indonesia untuk tahun 2010-2019 mendapati hasil yang berbeda antara hubungan kedua variabel dalam jangka pendek dan hubungan variabel dalam jangka panjang. Dari hasil uji kointegrasi, dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang kurs



mampu mempengaruhi inflasi serta begitu pula sebaliknya, inflasi dalam jangka panjang juga mampu mempengaruhi kurs. Berbeda dengan hasil penelitian (Imam M. 2020) menunjukkan bahwa nilai tukar dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Sedangkan suku bunga berpengaruh secara signifikan yang diikuti dengan kenaikan inflasi, tetapi untuk suku bunga bulan depan dapat diprediksi akan mengalami penurunan yang signifikan dan bersifat negatif. Sedangkan untuk indeks produksi industri menunjukkan pengaruh yang signifikan.

**b) Investasi Berpengaruh Signifikan Terhadap inflasi.**

Berdasarkan hasil pengelolaan *Confirmatory Faktor Analisis* (CFA) pada output rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan komponen 2 terbesar adalah investasi sebesar 0.889, layak mempengaruhi inflasi di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan investasi berpengaruh **signifikan** terhadap inflasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakti & Alie (2018) serta Marsela (2014) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi. Ketika inflasi terjadi akan menyebabkan berkurangnya pendapatan masyarakat dikarenakan nilai uang yang rendah, belum lagi harga barang pokok yang cenderung naik membuat masyarakat menjadi malas untuk menginvestasikan uangnya karena lebih memilih menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan yang harganya melonjak.

Hal ini diperkuat dengan pendapat dari Nopirin (2012:26) yang mengatakan bahwa seorang investor akan cenderung untuk melakukan investasi apabila tingkat inflasi di suatu Negara adalah stabil. Hal ini dikarenakan dengan adanya kestabilan dalam tingkat inflasi, maka tingkat harga barang-barang secara umum tidak akan mengalami kenaikan dalam jumlah yang signifikan. Investor akan merasa lebih terjamin untuk berinvestasi pada saat tingkat inflasi di suatu negara cenderung stabil atau rendah.

Dan ditambah dengan hasil penelitian (Samuel R. 2019) Hasil penelitian menunjukkan Kurs berpengaruh secara signifikan terhadap Inflasi, dan Investasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Inflasi. Moh Faizi (2020) menambahkan hasil penelitian didapati bahwa dalam jangka pendek tidak terdapat pengaruh kurs terhadap inflasi, sebaliknya inflasi berpengaruh terhadap kurs. Dalam jangka panjang kedua variabel kurs dan inflasi terdapat kausalitas. Terlihat penelitian (Sanawiyah S. 2018) menunjukkan (1) Variable Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2006-2015. (2) Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2006-2015,. (3) Kurs berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2006-2015. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian Hadi Sasana (2008) yang mengatakan bahwa investasi tidak berpengaruh negatif dan signifikan dengan inflasi swasta di Jawa Tengah.

Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Mankiw (2007:98) yang menyatakan bahwa jika memutuskan menerapkan kebijakan moneter inflasi adalah tinggi, inflasi variabel yang tinggi meningkatkan ketidakpastian bagi kreditor dan debitor dengan menjadikan mereka subjek pada redistribusi kekayaan arbitrer dalam jumlah yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya tingkat inflasi akan menyebabkan antara kreditor maupun debitor berusaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan yang akan mengakibatkan perusahaan mereka mengalami kebangkrutan. Dengan kata lain terdapat hubungan yang berlawanan antara inflasi dan investasi. Hal ini mungkin disebabkan karena pada tahun 2009 tingkat inflasi mengalami penurunan 2,78 persen atau dengan perkembangan -74,86 persen. Seharusnya hal ini akan diikuti dengan kenaikan jumlah investasi, tetapi kenyataannya jumlah investasi juga mengalami penurunan sebesar Rp. 2.732,34 Miliar atau dengan perkembangan -3,97 persen. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2010 dimana tingkat inflasi mengalami kenaikan 6,96 persen atau dengan perkembangan 150,20 persen sedangkan jumlah investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp.4.131,93 Miliar atau 51,22 persen. Selain itu Demand Pull Inflation juga dapat menjadi faktor penyebab inflasi tidak mempengaruhi terhadap pendapatan. Dengan adanya kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa yang melebihi jumlah yang bisa dihasilkan perekonomian maka kenaikan harga akan terjadi. Tetapi sekalipun harga barang maupun jasa mengalami kenaikan, pihak pengusaha akan tetap berusaha untuk

memproduksi barang semaksimal mungkin, sehingga dengan keadaan ini tidak menyurutkan investor untuk tetap berinvestasi, sehingga inflasi tidak begitu mempengaruhi investasi.

Salah satu jenis investasi yaitu investasi jenis saham yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Ketika tingkat inflasi tinggi, daya beli masyarakat akan menurun sementara biaya perusahaan meningkat karena terjadinya peningkatan harga bahan baku di pasar. Kondisi ini akan menyebabkan berkurangnya keuntungan atau pengembalian riil yang diperoleh oleh investor. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya tingkat inflasi akan menyebabkan antara kreditor maupun debitor berusaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan yang akan mengakibatkan perusahaan mereka mengalami kebangkrutan. Dengan kata lain terdapat hubungan yang berlawanan antara inflasi dan investasi di Indonesia.

**c) Pajak Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap inflasi.**

Berdasarkan hasil pengelolaan *Confirmatory Faktor Analisis* (CFA) pada output rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan faktor pajak tidak layak mempengaruhi inflasi di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan pajak **tidak signifikan** terhadap inflasi di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Putu Vilia Puspitha dan Ni Luh Supadmi (2018) serta Mispiyanti dan Ika Neni Kristanti (2017) yang menyatakan bahwa variabel penerimaan PPN tidak berpengaruh pada inflasi.

Harga barang dan jasa yang meningkat juga masih dalam batas wajar. Perusahaan penyedia barang dan jasa, serta objek PPN lainnya biasanya memiliki berbagai strategi untuk tetap mempertahankan penjualan di tengah inflasi, seperti menekan biaya produksi, biaya operasional dan biaya pemasaran. Sehingga harga barang dan jasa akan tetap stabil dan tidak mengurangi penjualan. Selain itu, apabila produsen terpaksa menaikkan harga, maka kuantitas barang yang diproduksi akan dikurangi.

Hasil penelitian (Novi P. 2018) menambahkan Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat inflasi, jumlah wajib pajak terdaftar dan penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sejalan dengan penelitian (Rafilio A. 2022) menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel tingkat inflasi memiliki pengaruh namun kearah negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian (melati 2017) menunjukan bahwa variabel tax amnesty, suku bunga dan kurs tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Sedangkan pada variabel indeks harga konsumen dan cadangan devisa berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat inflasi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bertingkat inflasi tidak dipengaruhi oleh tax amnesty, suku bunga dan kurs pada saat tax amnesty berlangsung dan tingkat inflasi dipengaruhi oleh indeks harga konsumen dan cadangan devisa pada saat tax amnesty berlangsung. Hasil penelitian (Eko P.

2018) menunjukkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d. 2017, karena berbicara mengenai inflasi berarti berbicara mengenai kondisi perekonomian secara makro dan berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi tersebut dialami oleh suatu negara dan akan berkenaan dengan penerimaan pajak pada negara tersebut. Sukirno (2015:9), menjelaskan bahwa selain inflasi, ada hal lain yang menyebabkan masalah makroekonomi utama yang akan selalu dihadapi oleh suatu negara dan berlangsung dalam jangka panjang. Berbeda dengan hasil penelitian (Denny G. 2018) Hasil penelitian Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Pajak tidak berpengaruh terhadap inflasi dikarenakan terjadinya kenaikan harga barang-barang yang mengakibatkan penerimaan penghasilan badan meningkat tetapi pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak badan kecil. Kecilnya pajak penghasilan yang dibayarkan karena wajib pajak badan membayar pajaknya sebesar 1% dari hasil penjualan atau penghasilan bruto mereka. Wajib pajak badan yang membayar pajak penghasilannya sebesar 1% dari penghasilan bruto adalah wajib pajak yang mempunyai penghasilan dalam setahun kurang dari Rp.4.800.000.000 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengatur besarnya tarif pajak yang harus dibayar oleh

wajib pajak apabila wajib pajak mempunyai penghasilan atau peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini wajib pajak badan yang mempunyai penghasilan atau peredaran bruto kurang dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak maka pajak penghasilan yang dibayarkan adalah sebesar 1% dari penjualan atau peredaran brutonya sehingga pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak badan kecil dan berdampak pada kecilnya pajak penghasilan badan yang diterima oleh negara.

Teori bakti menyatakan bahwa masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagai bakti masyarakat kepada negara. Tetapi tingkat inflasi tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan. Hal ini dikarenakan wajib pajak badan yang mempunyai penghasilan atau peredaran bruto dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 tidak membayar PPh Pasal 25 Badan tetapi membayar pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yaitu sebesar 1% dari hasil penjualan atau penghasilan brutonya.

#### **d) Pengeluaran Pemerintah Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap inflasi**

Berdasarkan hasil pengelolaan *Confirmatory Faktor Analisis* (CFA) pada output rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan faktor pengeluaran pemerintah tidak layak mempengaruhi inflasi di Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan pengeluaran pemerintah **tidak signifikan** terhadap inflasi di Indonesia.

Sejalan dengan hasil penelitian (Slamet Widodo 2019) yang menunjukkan pengerluran pemerintah signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, namun tidak signifikan terhadap inflasi, karna mengingat alokasi belanja pegawai dan belanja barang baik dalam komponen belanja pemerintah pusat maupun dalam komponen transfer ke daerah, terutama Dana Alokasi Khusus, proporsinya lebih besar dibandingkan dengan alokasi belanja modal dalam komponen belanja pemerintah pusat dan dana alokasi khusus dalam komponen transfer ke daerah.

Belanja negara dalam APBN terdiri dari belanja yang sifatnya mengikat seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang. Adapun belanja yang sifatnya tidak mengikat antara lain, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Dari seluruh komponen tersebut, kenaikan signifikan terjadi pada komponen belanja pegawai, yang dialokasikan untuk membayar gaji/honorarium PNS, tunjangan, kenaikan gaji berkala, dan pensiun. Namun tahun ke tahun dapat memicu terjadinya inflasi dalam bentuk kenaikan harga barang-barang. Komponen lain dalam belanja negara adalah besaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, yang juga turut mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kenaikan ini sebagai mandatory spending yang harus dipenuhi pemerintah sesuai dengan mandat konstitusi.



Kebijakan pemerintah dalam mengelola inflasi tercermin melalui besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah pada sektor-sektor yang menjadi penyumbang inflasi. Salah satu sektor yang menjadi komponen terbesar penyumbang inflasi adalah bahan makanan, dalam hal ini adalah beras. Kurangnya alokasi anggaran untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan turut mempengaruhi seberapa besar inflasi yang dihasilkan. Kebijakan lainnya yang turut berpengaruh terhadap inflasi adalah kebijakan penetapan harga atas komoditas tertentu oleh pemerintah atau dikenal dengan Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*). Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah yaitu inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, diantaranya harga BBM bersubsidi, tarif listrik, dan tarif angkutan.

Devisit anggaran (defisit) di Indonesia terjadi ketika pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pajak, pendapatan negara, dan pinjaman. Defisit anggaran bisa menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik karena dapat menyebabkan peningkatan utang pemerintah, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi.

Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap defisit anggaran di Indonesia mulai dari pengeluaran pemerintah yang tinggi, pendapatan rendah, subsidi, utang pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Hasil penelitian (Sirtal S. 2021) menunjukkan kenaikan tingkat suku bunga akan menurunkan jumlah uang beredar dan berpengaruh negatif terhadap tingkat inflasi. Jumlah uang beredar berpengaruh negatif terhadap inflasi akan tetapi tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian suku bunga, nilai tukar, pengeluaran pemerintah dan jumlah uang beredar secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap inflasi. Hasil penelitian (Prananda S. 2017) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kurs dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia. variabel bebas yaitu nilai tukar dan pengeluaran pemerintah mampu mempengaruhi variabel terikat yaitu inflasi sebesar 58%. Sedangkan sebesar 42% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang diluar penelitian. Secara parsial variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi Di Indonesia. Sedangkan, variabel pengeluaran pemerintah berpengaruh negative dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Hasil penelitian (Desi S. 2019) menunjukkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Ekspor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengeluaran Pemerintah secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Serta secara keseluruhan Ekspor, Pengeluaran Pemerintah, dan Inflasi secara simultan tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil penelitian (siti M. 2020) menunjukkan Pengeluaran Pemerintah dan

Pengeluaran Pemerintah  $t-2$  tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi pada model regresi jangka pendek sedangkan pada model regresi jangka panjang variabel Pengeluaran Pemerintah tidak berpengaruh signifikan. Hasil Penelitian dari (M. Affan 2020) menunjukkan pengeluaran pemerintah dan pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia. Diharapkan masing-masing provinsi dapat menyusun peta jalan pengendalian inflasi daerah untuk dapat memetakan potensi dan masalah serta strategi yang akan dilaksanakan dengan fokus terhadap 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Hasil penelitian dari (Nurul A. 2020) menunjukkan pengeluaran pemerintah dan pajak terhadap inflasi menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kointegrasi antara inflasi dengan variabel kebijakan fiskal tersebut. Hal ini terlihat dari koefisien error correction dari inflasi yang tidak signifikan walaupun memiliki nilai yang negatif.

Hasil dari pengujian VECM menunjukkan bahwa variabel yang signifikan yang mempengaruhi output dalam jangka panjang adalah pajak. Variabel inflasi dan suku bunga mempunyai tanda sesuai yang diharapkan dimana dalam jangka panjang peningkatan inflasi serta suku bunga dapat memperlambat output. Variabel pengeluaran pemerintah memiliki tanda sesuai yang diharapkan namun tidak signifikan. Di lain pihak pajak ternyata berdampak positif terhadap output dalam jangka panjang. Hal ini dapat berarti bahwa pendapatan pajak merupakan salah satu bagian terpenting dalam pembiayaan Pemerintah khususnya untuk

pembangunan. Koefisien error correction untuk output (negatif dan signifikan yang mengindikasikan adanya penyesuaian terhadap ketidakstabilan yang terjadi dalam jangka pendek. Hubungan yang positif antara pengeluaran pemerintah dengan output sejalan dengan teori dan beberapa studi empiris. Berdasarkan teori Keynes, kebijakan fiskal dapat menggerakkan perekonomian karena peningkatan pengeluaran pemerintah atau pemotongan pajak mempunyai efek multiplier dengan cara menstimulasi tambahan permintaan untuk barang konsumsi oleh rumah tangga.

**e) Suku Bunga Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap inflasi**

Berdasarkan hasil pengelolaan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) pada output rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan faktor suku bunga tidak layak mempengaruhi inflasi di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan suku bunga **tidak signifikan** terhadap inflasi di Indonesia.

Sejalan dengan hasil penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan hasil studi yang dilakukan (Don Sama Lelo et al., 2018) yang memberikan kesimpulan bahwa tingkat suku bunga baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang memberikan pengaruh yang negatif terhadap Inflasi di Indonesia.

Tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap tingkat inflasi karna Inflasi yang tidak terkendali bahkan cenderung naik tiap tahunnya merupakan akibat dari pasokan atau penawaran barang dan jasa yang mampu tidak memenuhi permintaan dari masyarakat

Dan juga tingkat inflasi yang terus menurun hingga dibawah target, atau berpotensi deflasi, juga berbahaya bagi perekonomian dikarenakan daya beli masyarakat pasti menurun. Oleh karena itu, upaya BI bersama pemerintah dalam memulihkan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat yaitu dengan kembali menurunkan suku bunga acuan atau 7days repo-rate. penurunan suku bunga acuan ini sejalan dengan tingkat inflasi yang masih rendah. Dengan diturunkannya suku bunga diharapkan mampu mendukung pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat demi meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat serta pemulihan ekonomi nasional.

Hasil penelitian (Aulia S. 2022) menunjukkan Hasil analisis menunjukkan jumlah uang beredar berpengaruh signifikan terhadap inflasi, tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap inflasi, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap inflasi. Hasil penelitian (Elvira H. 2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Suku Bunga SBI berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Inflasi sedangkan tingkat kurs berpengaruh positif dan signifikan. Untuk variabel PDB berpengaruh negative dan signifikan terhadap Inflasi di Indonesia.

Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian (Langi, 2014) yang memberikan kesimpulan serupa yaitu terdapat pengaruh positif signifikan tingkat suku bunga terhadap inflasi di Indonesia selama tahun 2005-III sampai 2013-III. Hasil penelitian (Elisabetr H. 2022)

menunjukkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung jumlah uang beredar dan nilai tukar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat inflasi. Sedangkan suku bunga memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap inflasi. Secara tidak langsung, hanya suku bunga yang memiliki peran dalam memediasi hubungan antara jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi. Hasil penelitian (A. Mahendra 2016) menunjukkan hasil penelitian bahwa jumlah uang beredar dan nilai tukar (Rp / USD) tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi sementara suku bunga (SBI) juga tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi.

Suku Bunga (SBI) mempunyai pengaruh negative terhadap Inflasi di Indonesia, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik tetapi sesuai dengan teori. Menurut Hubbard (1997), suku bunga adalah biaya yang harus dibayar borrower atas pinjaman yang diterima dan imbalan bagi lender atas investasinya. Sementara itu, Kern dan Guttman (1992) menganggap suku bunga merupakan sebuah harga dan sebagaimana harga lainnya, maka tingkat suku bunga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia adalah suku bunga hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Secara teori apabila suku bunga SBI naik maka akan mendorong keinginan para pelaku ekonomi dan masyarakat untuk menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi yakni membeli

surat berharga dari pada menggunakan uangnya untuk konsumsi, sehingga tidak akan menyebabkan inflasi. Akan tetapi kenaikan suku bunga SBI tidak terlalu berpengaruh.

**f) Ekspor Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap inflasi**

Berdasarkan hasil pengelolaan *Confirmatory Faktor Analisis* (CFA) pada output rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan faktor ekspor tidak layak mempengaruhi inflasi di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan ekspor **tidak signifikan** terhadap inflasi di Indonesia.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Larasati dan Budhi (2018) yang menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai ekspor alas kaki Indonesia ke Tiongkok tahun 1997-2016. Dalam penelitian Noviana dan Sudarti (2018) juga dinyatakan inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ekspor komoditi karet di Indonesia.

Ekspor mempengaruhi persediaan produk yang tersedia bagi konsumen domestik, dan karenanya mempengaruhi harga. Artinya, perdagangan internasional berfungsi seperti pintu terbuka, sehingga tekanan harga didalam negeri bisa dikurangi oleh arus produk masuk kenegara tersebut. Ketika permintaan melebihi tingkat output domestik maka ketidaksesuaian antara permintaan dan kondisi pasokan mengarah ke kondisi inflasi. Menanggapi kelebihan permintaan ini dapat memanfaatkan kebijakan impor. Di sisi lain, ketika permintaan di

bawah tingkat output domestik, inflasi akan mulai berkurang. Selain itu, kelebihan output dapat ditangani dengan mengekspor ke negara lain.

Inflasi merupakan proses kenaikan harga-harga umum dari barang-barang secara terus menerus selama periode tertentu, dimana tingkat inflasi melemahkan neraca perdagangan. Hal ini disebabkan karena inflasi akan mendorong pelemahan daya saing dan pada akhirnya menyebabkan penurunan ekspor. Di Indonesia sendiri permintaan barang dan jasa dari Negara import tidak memenuhi sehingga terjadinya inflasi terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh Negara Indonesia.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri, Suhadak dan Sulasmiyati (2016) bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor tekstil Indonesia ke Korea Selatan karena terdapat faktor lain yang mempengaruhi seperti keadaan makro ekonomi yang ada pada suatu negara. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari Mahendra dan Kesumajaya (2015) bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor di Indonesia pada tahun 1992 sampai 2012. Penelitian yang dilakukan oleh Purusa dan Istiqomah (2018) menjelaskan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap kegiatan ekspor yang ada di negara-negara di Asian Tenggara. Hasil penelitian dari Riza (2014), Ektiarnanti, Rahmawati, Fauziah, dan Rofiqoh (2021) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor di Indonesia. Penelitian dari Yanti dan Indrajaya (2017) juga menjelaskan bahwa secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor Indonesia. Hasil penelitian (muttaqin K. 2018)



menunjukkan bahwa ekspor berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap inflasi secara langsung, sedangkan penanaman modal asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi secara langsung. Untuk variabel tingkat kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan Terhadap inflasi di Indonesia. Variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kurs dan penanaman modal asing berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kurs. Hasil penelitian dari (Sovia Z. 2022) menunjukkan bahwa (1) Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor produk halal dalam jangka pendek dan jangka panjang, (2) Nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ekspor produk halal dalam jangka pendek, tetapi tidak berpengaruh signifikan dalam jangka panjang. (3) Inflasi dan nilai tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ekspor produk halal dengan kontribusi sebesar 32.06%. Hasil penelitian (Yeni P. 2017) menunjukkan bahwa uji parsial laju inflasi berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah sedangkan nilai ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Selain itu, hasil uji silmutan menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan nilai ekspor mempengaruhi nilai tukar rupiah. Hasil penelitian dari (Iqbal A. 2022) menunjukan bahwa variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor di Indonesia dalam jangka panjang. Variabel kurs rupiah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ekspor di Indonesia dalam jangka panjang sedangkan dalam jangka pendek berpengaruh negatif

dan signifikan. Sedangkan untuk variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ekspor di Indonesia.

Tingkat inflasi yang tinggi berdampak negatif terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi karena adanya inflasi mengakibatkan harga naik, menurunkan daya beli masyarakat dan membuat penurunan perekonomian negara. Sedangkan inflasi yang kecil akan mendorong perekonomian suatu negara. Menurut Bank Indonesia (2003) tingkat inflasi memberikan dampak pada kegiatan ekonomi dalam suatu negara karena akan menciptakan ketidakpastian dalam perekonomian sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi.

**g) Hutang Luar Negeri Tidak Berpengaruh Signifikan Terhadap Inflasi**

Berdasarkan hasil pengelolaan *Confirmatory Faktor Analysis* (CFA) pada output rotasi (*Rotated Component Matrix*) memperlihatkan faktor hutang luar negeri tidak layak mempengaruhi inflasi di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan hutang luar negeri **tidak signifikan** terhadap inflasi di Indonesia.

Sejalan hasil penelitian (Evaria 2017) yang menunjukkan dampak negatif yang terlihat ketika perekonomian tidak stabil dari sudut inflasi yang kurang terkendali maka akan menambah biaya dalam berbagai macam aspek baik pengeluaran maupun belanja, dan menurunkan tingkat kepercayaan dan perbaikan perekonomian diutamakan terlebih dahulu ketimbang melakukan pinjaman kembali.

Defisit keuangan pemerintah, tingkat inflasi dalam negeri juga diduga berpengaruh terhadap volume penyerapan utang luar negeri. Ketika inflasi di dalam negeri tinggi negara donor akan mempertimbangkan ulang keputusan untuk memberikan pinjaman ke Indonesia. Hal ini dikarenakan besarnya risiko negara penerima (Indonesia) tidak mampu untuk mengembalikan utang termasuk bunga dan pinjaman pokoknya. Sehingga ketika tingkat inflasi di dalam negeri meningkat, maka volume penyerapan utang luar negeri akan menurun.

Pada jangka panjang inflasi akan berpengaruh negatif karena ketika inflasi tinggi dan tak terkendali yang menandakan bahwasannya perekonomian kurang baik, yang menurunkan kepercayaan dari negara yang akan meminjamkan utang karena takut akan kemampuan pengembalian utang, dan pada negara yang akan meminjamkan memperhitungkan peminjaman kembali dan memilih memperbaiki perekonomian yang kurang baik saat ini dan menahan peminjaman kembali.

Hasil Penelitian (Defrizal S. 2018) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan inflasi mempunyai pengaruh yang signifikan berpengaruh dalam jangka panjang, namun tingkat suku bunga tidak berpengaruh signifikan, dan dalam jangka pendek semuanya berpengaruh signifikan dampaknya terhadap utang luar negeri di Indonesia. Hasil penelitian (Irawan M. 2022) menunjukkan variabel INFLASI Lag 1 memiliki pengaruh yang positif dan INFLASI Lag 2 memiliki pengaruh yang negatif terhadap INFLASI dalam jangka

pendek sedangkan variabel FINC, PUAS, JUB(M2), dan ULN tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil VECM jangka panjang menunjukkan bahwa variabel FINC dan JUB memiliki pengaruh positif sedangkan variabel ULN memiliki pengaruh negatif. Dalam jangka panjang variabel PUAS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap INFLASI. Dan hasil penelitian (M. Faried 2022) menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia, suku bunga berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia, dan inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia. Hasil penelitian sejalan yang dilakukan oleh (Defrizal Saputra, Hasdi Aimon, 2018) yang menjelaskan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap utang luar negeri. Dalam menganalisa hubungan tingkat inflasi terhadap utang luar negeri, dapat digunakan teori imported inflation. Dimana saat Indonesia mengalami inflasi, maka nilai tukar rupiah terhadap dollar akan lemah. Indonesia masih tergantung produk dari luar baik bahan baku atau bahan setengah jadi disektor barang dan jasa. Sehingga saat terjadi inflasi Indonesia, pemerintah membutuhkan dana yang lebih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri tersebut dan dibutuhkanlah utang luar negeri. Dari hasil pengujian diatas angka inflasi menurun walaupun fluktuatif tetapi utang luar negeri juga semakin naik sehingga hasilnya negatif, artinya Inflasi tidak dapat mengurangi beban utang luar negeri yang semakin bertambah setiap tahunnya.

## 2. Analisis Hasil Regresi Linear Berganda.

### a) Pengaruh Nilai tukar Terhadap inflasi.

Berdasarkan uji hipotesis parsial yang dilakukan, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  nilai tukar sebesar  $2,105 > 1,652$  kemudian nilai sig  $0,000 < 0,05$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya nilai tukar signifikan dengan inflasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wijayanti dan Sudarmiani (2017) dan Puspitaningrum (2014) namun berbeda dengan penelitian Istiqomah dan Henny (2018; Firdaus, 2019). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa tingkat inflasi di Indonesia (pada periode tahun 2020 dan 2021) tertinggi adalah pada bulan Pebruari 2020 sebesar 2,98% dimana pada saat itu beredar isu karantina wilayah yang membuat terjadi panic buying yang berlanjut pada bulan Maret 2020 sebesar 2,96% dimana pada periode berikutnya terus menurun terendah pada bulan Juni 2021.

Selain itu juga, memiliki koefisiensi beta sebesar 0,573, yang artinya apabila nilai tukar terjadi penurunan maka inflasi akan menurun sebesar 57,3 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Ravena M. 2023) Hasil penelitian menunjukkan Kurs berpengaruh secara signifikan terhadap Inflasi, dan Investasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Inflasi. Hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan yang sedikit berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan Purba (2018), dimana

antar dua variabel terdapat kausalitas. sekaligus hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan Winanda & Seftarita (2016), yang menyebutkan bahwa tidak terdapat kausalitas antara kedua variabel. Hasil ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan Azam Achsani dkk., (2010), yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan kausalitas yang kuat di Negara amerika dan erpa, sementara di Negara-negara Asia terdapat kausalitas satu arah dimana kurs berpengaruh terhadap inflasi. Pengamatan yang dilakukan dengan menganalisis data kurs dan data inflasi bulanan di Indonesia untuk tahun 2010-2019 mendapati hasil yang berbeda antara hubungan kedua variabel dalam jangka pendek dan hubungan variabel dalam jangka panjang. Dari hasil uji kointegrasi, dapat disimpulkan bahwa dalam jangka panjang kurs mampu mempengaruhi inflasi serta begitu pula sebaliknya, inflasi dalam jangka panjang juga mampu mempengaruhi kurs. Berbeda dengan hasil penelitian (Imam M. 2020) menunjukkan bahwa nilai tukar dan jumlah uang beredar tidak berpengaruh terhadap inflasi di Indonesia. Sedangkan suku bunga berpengaruh secara signifikan yang diikuti dengan kenaikan inflasi, tetapi untuk suku bunga bulan depan dapat diprediksi akan mengalami penurunan yang signifikan dan bersifat negatif. Sedangkan untuk indeks produksi industri menunjukkan pengaruh yang signifikan.

Mundell (1962) menjelaskan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi nilai tukar dan selanjutnya berpengaruh terhadap output dan inflasi. Mundell menunjukkan bahwa perfect capital

mobility akan menimbulkan hubungan interest parity relationship antar tingkat suku bunga jangka pendek dengan nilai tukar, yang menunjukkan bahwa perbedaan tingkat suku bunga antara dua negara sama dengan perubahan ekspektasi nilai tukarnya.

#### **b) Pengaruh Investasi Terhadap inflasi.**

Berdasarkan uji hipotesis parsial yang dilakukan, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  investasi sebesar  $2.038 > 1,652$  kemudian nilai sig  $0,001 < 0,05$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya investasi signifikan dengan inflasi.

Sejalan dengan hasil penelitian (Reneva Manurung 2022) yang menunjukkan factor kurs dan investasi berpengaruh signifikan terhadap inflasi Sumatera Utara, dan pergerakan kurs dan investasi dapat mempengaruhi inflasi secara bersamaan. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terkait dapat mempertimbangkan faktor kurs dan investasi dalam merencanakan kebijakan dan strategi pengendalian inflasi di Sumatera Utara.

Dengan begitu, inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Akan ada barang dan jasa yang akan Investor konsumsi dan gunakan sehari-hari yang tingkat kenaikannya mungkin lebih tinggi atau lebih rendah daripada tingkat inflasi yang dilaporkan. Namun secara umum, inflasi yang dilaporkan oleh BPS dapat dijadikan sebagai acuan kenaikan harga secara umum yang terjadi di Indonesia. Jadi Jika Terjadi

Inflasi Maka Investor akan cenderung mengambil keputusan wait and see.

Selain itu juga, memiliki koefisiensi beta sebesar 0,425, yang artinya apabila investasi terjadi peningkatan, maka inflasi akan menurun sebesar 42,5 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan dengan inflasi di Indonesia.

Sejalan dengan hasil penelitian (Samuel R. 2019) Hasil penelitian menunjukkan Kurs berpengaruh secara signifikan terhadap Inflasi, dan Investasi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Inflasi. Moh Faizi (2020) menambahkan hasil penelitian didapati bahwa dalam jangka pendek tidak terdapat pengaruh kurs terhadap inflasi, sebaliknya inflasi berpengaruh terhadap kurs. Dalam jangka panjang kedua variabel kurs dan inflasi terdapat kausalitas. Terlihat penelitian (Sanawiyah S. 2018) menunjukkan (1) Variable Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2006-2015. (2) Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2006-2015,. (3) Kurs berpengaruh negatif dan signifikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2006-2015. Namun berbanding terbalik dengan hasil penelitian Hadi Sasana (2008) yang mengatakan bahwa investasi tidak berpengaruh negatif dan signifikan dengan inflasi swasta di Jawa Tengah.



Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Mankiw (2007:98) yang menyatakan bahwa jika memutuskan menerapkan kebijakan moneter inflasi adalah tinggi, inflasi variabel yang tinggi meningkatkan ketidakpastian bagi kreditor dan debitor dengan menjadikan mereka subjek pada redistribusi kekayaan arbiter dalam jumlah yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya tingkat inflasi akan menyebabkan antara kreditor maupun debitor berusaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan yang akan mengakibatkan perusahaan mereka mengalami kebangkrutan. Dengan kata lain terdapat hubungan yang berlawanan antara inflasi dan investasi. Hal ini mungkin disebabkan karena pada tahun 2009 tingkat inflasi mengalami penurunan 2,78 persen atau dengan perkembangan -74,86 persen. Seharusnya hal ini akan diikuti dengan kenaikan jumlah investasi, tetapi kenyataannya jumlah investasi juga mengalami penurunan sebesar Rp. 2.732,34 Miliar atau dengan perkembangan -3,97 persen. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2010 dimana tingkat inflasi mengalami kenaikan 6,96 persen atau dengan perkembangan 150,20 persen sedangkan jumlah investasi juga mengalami peningkatan sebesar Rp.4.131,93 Miliar atau 51,22 persen. Selain itu Demand Pull Inflation juga dapat menjadi faktor penyebab inflasi tidak mempengaruhi terhadap pendapatan. Dengan adanya kelebihan permintaan terhadap barang dan jasa yang melebihi jumlah yang bisa dihasilkan perekonomian maka kenaikan harga akan terjadi. Tetapi sekalipun harga barang maupun jasa mengalami kenaikan, pihak pengusaha akan tetap berusaha untuk

memproduksi barang semaksimal mungkin, sehingga dengan keadaan ini tidak menyurutkan investor untuk tetap berinvestasi, sehingga inflasi tidak begitu mempengaruhi investasi.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Kredibilitas dalam penelitian ini merujuk pada keyakinan pasar dan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan dan mempertahankan kebijakan fiskal dengan konsistensi dan efektivitas. Kebijakan fiskal yang dianggap kredibel dapat meningkatkan kepercayaan pelaku ekonomi, termasuk investor dan konsumen, dengan alat ukur tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah.

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, seperti pengeluaran pemerintah, pendapatan pajak, dan utang publik. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi inflasi karena pengeluaran pemerintah dan pajak dapat mempengaruhi permintaan agregat di pasar. Dari hasil penelitian pada *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tabel KMO and *Bartlett's Test* menunjukkan data sudah valid dan dapat dianalisis lebih lanjut dengan analisis faktor. Nilai uji *Bartlett* menyatakan matriks korelasi yang terbentuk merupakan matriks identitas, atau dengan kata lain model *factor* yang digunakan sudah baik dan pada tabel *Rotated Matriks* diketahui bahwa dari tujuh faktor, maka yang layak mempengaruhi inflasi di Indonesia ada dua faktor yang berpengaruh signifikan terhadap inflasi yaitu:

- a) Nilai tukar signifikan dengan inflasi di Indonesia karena nilai tukar dapat mempengaruhi harga dan juga dapat meningkatkan asset dan saham dalam kurun waktu yang tertentu.
  - b) Investasi signifikan dengan inflasi di Indonesia karena investasi dapat berubah sesuai dengan tingkat harga barang dan jasa sudah stabil dan pasar global.
2. Hasil regresi linier berganda menunjukkan jika nilai tukar terjadi penurunan maka inflasi akan menuru dan jika investasi terjadi peningkatan, maka inflasi akan menurun. Hasil uji hipotesis parsial menunjukkan nilai tukar dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

## **B. Saran**

Pada akhir penulisan, penulis memberikan saran yang nantinya dapat digunakan untuk membangun dan menjadi telaah bagi kita agar bisa memperbaiki faktor yang mempengaruhi inflasi di Indonesia adapun saran yang diberikan antara lain :

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk menyesuaikan pajak setiap barang dan jasa yang dijual belikan agar tidak memberikan inflasi terhadap perekonomian yang akan mendatang.
2. Diharapkan kepada pemerintah mengambil kebijakan diskresi dengan menyesuaikan kebijakan yang tepat untuk stabilisasi pengendalian inflasi yang tak terduga.
3. Diharapkan kepada pemerintah mengurangi produk-produk dari luar yang potensial mendorong terjadinya inflasi, agar lebih mengutamakan

produk lokal untuk memperkuat industri dalam negeri sehingga tidak terlalu bergantung pada barang impor.

4. Kepada pemerintah atau penyelenggara kebijakan di Indonesia agar mengurangi penggunaan hutang luar negeri untuk pembangunan maupun memperbaiki perekonomian, sehingga berdampak pada suku bunga yang akan dibayarkan.
5. Kepada penelitian selanjutnya agar memberikan perubahan atau pun menambah dalam menggunakan variabel yang lain seperti JUB, konsumsi dan pendapatan, menggunakan metode lain seperti VAR, Model Simultan dan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Ade Novalina, S. E. (N.D.). *Keakuratan Metode Capital Asset Pricing Model (Camp) Dan Arbitrage Pricing Theory (Apt) Dalam Memprediksi Return Saham Pada Bank Persero (Bumn) Di Indonesia*.
- Adimanyu, Anggita dan Andie Megantara. *Era Baru Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta : Buku Kompas, 2019.
- Alatas, H., Karyomanggolo, Dahlan, A. M., Aswitha, B., & Nikmah, I. (2018). Desain Penelitian. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, 3(5), 104–138.
- Aslan, A., Silvia, S., Nugroho, B. S., Ramli, M., & Rusiadi, R. (2020). Teacher’s Leadership Teaching Strategy Supporting Student Learning During The Covid-19 Disruption. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(3), 321–333. <https://doi.org/10.31538/Ndh.V5i3.984>
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Hidayat, R. (2018). Kemampuan Panel Auto Regressiv Distributed Lag Dalam Memprediksi Fluktuasi Saham Property And Real Estate Indonesia. *Jepa*, 3(2), 133–149.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance

- Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- G. Kopits dan S. Symansky. *Fiscal Policy Rules (Issue 162 of Occasional Papers)*. International Monetary Fund. 1998.
- Jafari, Ahmad DKK. *Openness and Inflation : New Empirical Panel Data Evidence*. *Economics Letters* ISSN 573-577, 2011.
- J.Baumol William & S.Blinder Alan. *Economics Principles and Policy*. United States of Amerika : Harcourt Brace Jovanovich,inc.1988.
- Kompas. *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep dan Implementasi*. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2004.
- Kuncoro, Haryo. *Does the Credible Fiscal Policy Support the Prices Stabilization*. Jakarta: Review of Economic Perspective ISSN 1213-2446, 2015.
- Kuncoro, Haryo. *Does The Credible Fiscal Policy Reduce Its Volatility? The Case Of Indonesia*. *Journal of Applied Economic Sciences*, Volume IX Issue 3(29), 2014.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst The Competition Of Private Universities By Maximizing Brand Image And Interest In Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317– 3328. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.2037>
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkyu, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkyu, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Nazliana, L., Pembangunan, U., Budi, P., Novalina, A., Pembangunan, U., Budi, P., & Inclusion, F. (2020). *Pengendalian Inflasi Di Indonesia Berbasis Kebijakan Fiskal Dengan Model Fiscal Policy With The Seemingly Unr ... Pengendalian Inflasi Di Indonesia Berbasis Kebijakan Fiskal Dengan Model Seemingly Unrelated Regression Inflation Control In Indonesia Based . February 2022*. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v>

- Novalina, A. (2018a). Analisis Dampak Kenaikan Harga Bbm Terhadap Ketahanan Disposable Income Nelayan Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan. *Jepa*, 2(1), 1–12.
- Novalina, A. (2018b). Analisis Prediksi Pelemahan Ekonomi Indonesia Rezim Depresiasi Kurs. *Jepa*, 1(1), 1–11.
- Novalina, A. (2018c). Confirmatory Factor Analysis Terhadap Kemandirian Ekonomi Wanita Pesisir Berbasis Kesejahteraan Keluarga Nelayan Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram. *Jepa*, 3(1), 65–74.
- Novalina, A. (2018d). Kemampuan Bi 7-Day Repo Rate (Bi7drr) Dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Indonesia (Pendekatan Transmisi Moneter Jangka Panjang). *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, 10(2), 1874–1885.
- Putri, M., Wibowo, P., Aryza, S., & Utama Siahaan, A. P. (N.D.).
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rangkuty, D.M. And Hidayat, M. 2021. Does Foreign Debt Have An Impact On Indonesia's Foreign Exchange Reserves? *Ekulibrium Journal* Vol. 16(1) Pp. 85-93.
- Rangkuty, D.M. And Hidayat, M. 2019. Using The Ecm Approach Between Growth Of The Current Account Balance And Foreign Exchange Reserve In Indonesia. *Ajhsr Journal* Vol. 3 (10) Pp. 51-57
- Rangkuty, D.M. Dan B., Mesra. 2022. *Ekonomi Moneter Internasional*. Lppm Undikma. Mataram.
- Rangkuty, D.M. Dan Pangeran. 2023. *Ekspor Impor*. Tahta Media Group. Klaten.
- Rangkuty, D.M. Dan Yusuf, Mohammad. 2020. *Ekonomi Moneter*. Manhaji. Medan.
- Rangkuty, D.M. Dan Efendi, Bakhtiar. 2022. *Teori Ekspor (Studi Kasus: Ekspor Indonesia Ke Negara Asean)*. Lppm Undikma. Mataram.
- Rangkuty, D.M. Dkk. 2022. *Teori Inflasi (Studi Kasus: Pelaku Usaha Rumah Tangga Desa Klambir Lima Kebun Sebelum Dan Selama Pandemi Covid- 19)*. Deepublish. Yogyakarta.
- Rusiadi.(2018). An Implementation Of A Filter Design Passive Lc In Reduce A Current Harmonisa. *International Journal Of Civil Engineering And Technology*, 9(7), 867–873.
- Rusiadi, Et Al. 2016. Indonesia Macro Economy Stability Pattern Prediction (Mundell-Flamming Model). *Iosr Journal Of Economics And Finance* Vol. 7(5) Pp. 16-23.



- Rusiadi, R. (2019). Kemampuan Panel Ardl Memprediksi Ketahanan Fundamental Ekonomi Negara Muslim Emerging Market. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 19(1), 91–99. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.V19i1.3243>
- Rusiadi, R., Aprilia, A., Adianti, V., & Verawati, V. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Stabilitas Ekonomi Dunia (Studi 14 Negara Berdampak Paling Parah). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (Jepa)*, 5(2), 173–182.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.
- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- Sebayang, S., Novalina, A., Nasution, A. P., & Panggabean, L. S. R. (2019). *An Empirical Investigation Of The Factors Influencing Village Development: A Confirmatory Factor Analysis*. 64, 134–145. <https://doi.org/10.2991/Piceeba2-18.2019.118>
- Sembiring, R. (2018). Dampak Perubahan Budaya Sosial Ekonomi Terhadap Kemiskinan Dan Kesejahteraan Pada Masyarakat Desa Pahlawan. *Jepa*, 3(1), 75–82.
- Setiawan, A., Hasibuan, H. A., Siahaan, A. P. U., Indrawan, M. I., Fatmawati, I., Wakhunyi, E., Astuti, D., Novalina, A., & Rahayu, S. (2018). Dimensions Of Cultural Intelligence And Technology Skills On Employee Performance. *International Journal Of Civil Engineering And Technology*, 9(10), 50–60.

- Suroso, S., Rusiadi, R. B., Purba, A. P. U., Siahaan, A. K., Sari, A. N., & Lubis, A. I. F. (2018). Autoregression Vector Prediction On Banking Stock Return Using Capm Model Approach And Multi-Factor Apt. *Int. J. Civ. Eng. Technol*, 9(9), 1093–1103.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Tang, Hsiao Chink, Philip Liu, dan Eddie C. Cheung. Changing Impact of Fiscal Policy on Selected ASEAN Countries. Philippines: ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration. 2010.
- Von, Jurgen Hagen & Guntram. What doo deficits tell us about debt Empirical evidence on creative accounting with fiscal rules in the EU. Germany : Journal of Banking and Finance ISSN 3259-3279, 2006.
- Wijaya, Faried. Pengantar Ekonomika Makro. Yogyakarta : BPFE, 1990.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.
- Yanuar. Ekonomi Makro Suatu Analisis Untuk Konteks Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka. Jakarta : Yayasan Mpu Ajar Artha, 2009.
- Yihyis, Zelealem. Trade Openness and Inflation Performance : A Panel Data Analysis in the context of Afrika Countries. *African : Journal of African Development Reviews* Vol 25 No 1, 2013.
- Zakaria, Muhammad. Openness and Inflation : Evidence From time Series Data. Pakistan : Journal of Pakistan institute of development economics, 2010.